

NASIONAL

Guru Besar Unair: Benarkah Prabowo Sengaja Dibuat Lemah agar Tak Tuntas Memerintah hingga 2029?

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.06 WIB



BANDA ACEH - Berbagai persoalan yang melanda Indonesia memunculkan pertanyaan besar mengenai kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Apakah kondisi pemerintahan saat ini menunjukkan kemampuan Prabowo berada di bawah pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi)?

Ataukah ada skenario Politik yang sejak awal dirancang untuk membuat pemerintahan Prabowo

lemah dan gagal menyelesaikan masa jabatan hingga 2029?

Pertanyaan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subianto, saat menyoroti dinamika politik nasional dan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo, Ahad (18/10/2026).

Henri mengangkat kemungkinan bahwa terpilihnya Prabowo pada Pilpres 2024 tidak sepenuhnya

dapat dibaca sebagai pergantian kepemimpinan biasa.

Ia mempertanyakan apakah terdapat kalkulasi politik dari kekuatan tertentu yang menghendaki pemerintahan Prabowo tidak berjalan optimal, bahkan berpotensi tumbang sebelum masa jabatannya berakhir.

Dalam pandangan tersebut, berbagai persoalan yang muncul di pemerintahan tidak hanya berkai-

tan dengan kemampuan presiden mengelola negara, tetapi juga membuka ruang bagi dugaan adanya pertarungan kepentingan di lingkaran kekuasaan.

Henri menggambarkan kemungkinan adanya skenario yang membuat pemerintahan Prabowo sejak awal berada dalam posisi rentan.

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	22
Aneka Berita	24

NASIONAL

2 Tahun Prabowo, Gibran Terasingkan di Istana: Di Rapat Kabinet Tak Diikut Sertakan



BANDA ACEH - Pemandangan ganjil kerap mewarnai roda administrasi pemerintahan saat ini menjelang usianya yang genap dua tahun pada 20 Oktober 2026.

Sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terpantau semakin sering absen dari pusat pengambilan keputusan yang mana lebih sering dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

10 Tahun Berkuasa, Andi Sinulingga: Jokowi Lakukan Operasi Politik Jatuhkan Reputasi Politik Seseorang



BANDA ACEH - Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga melontarkan kritik terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik ijazah yang terus menjadi perbincangan publik.

Ia menyinggung berbagai operasi Politik yang menurutnya terjadi selama 10 tahun Jokowi berkuasa untuk menurunkan reputasi politik seseorang.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Aktivist 98: Jokowi dan Gibran Menjadi Musuh Rakyat



BANDA ACEH - Aktivis 1998 Jayadi Santoso melontarkan kritik keras terhadap Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai keduanya telah menimbulkan persoalan serius dalam kehidupan bernegara, mulai dari polemik dugaan ijazah Jokowi hingga proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Selengkapnya di halaman 4 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP
[www.harianaceh.co-id](http://www.harianaceh.co.id)

Bank Aceh

ActiOn

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

NASIONAL

41 BERITA

NASIONAL

Guru Besar Unair: Benarkah Prabowo Sengaja Dibuat Lemah agar Tak Tuntas Memerintah hingga 2029?

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.06 WIB



BANDA ACEH - Berbagai persoalan yang melanda Indonesia memunculkan pertanyaan besar mengenai kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Apakah kondisi pemerintahan saat ini menunjukkan kemampuan Prabowo berada di bawah pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi)?

Ataukah ada skenario Politik yang sejak awal dirancang untuk membuat pemerintahan Prabowo lemah dan gagal menyelesaikan masa jabatan hingga 2029?

Pertanyaan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subianto, saat menyortir dinamika politik nasional dan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo, Ahad (18/10/2026).

Henri mengangkat kemungkinan bahwa terpilihnya Prabowo pada Pilpres 2024 tidak sepenuhnya dapat dibaca sebagai pergantian kepemimpinan biasa.

Ia mempertanyakan apakah terdapat kalkulasi politik dari kekuatan tertentu yang menghendaki pemerintahan Prabowo tidak berjalan optimal, bahkan berpotensi

tumbang sebelum masa jabatannya berakhir.

Dalam pandangan tersebut, berbagai persoalan yang muncul di pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan presiden mengelola negara, tetapi juga membuka ruang bagi dugaan adanya pertarungan kepentingan di lingkaran kekuasaan.

Henri menggambarkan kemungkinan adanya skenario yang membuat pemerintahan Prabowo sejak awal berada dalam posisi rentan. Pemerintahan yang lemah, menu-rut gambaran ini, dapat lebih mudah digero-goti dari dalam, kehilangan dukungan politik, dan menghadapi tekanan publik yang semakin besar.

Jika dugaan tersebut benar, persoalan yang dihadapi Prabowo bukan hanya menyangkut kinerja kabinet atau kebijakan ekonomi. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana menghadapi kekuatan politik lama yang diduga masih memiliki pengaruh terhadap negara, partai politik, dan kelompok elite.

Pertanyaan mengenai kapasitas Prabowo dibandingkan Jokowi juga perlu dijawab melalui evaluasi kebijakan, kondisi ekonomi, efektivitas pemerintahan, dan kemampuan keduanya dalam menghadapi persoalan nasional.

Meski menggambarkan kemungkinan adanya upaya pelemahan dari dalam, Henri tidak memandang Prabowo sebagai pemimpin yang pasif dan tidak memiliki strategi.

Prabowo merupakan seorang jenderal yang memiliki pengalaman panjang dalam politik dan pertarungan kekuasaan. Karena itu, ia dinilai memiliki kemampuan untuk membangun kekuatan, memperkuat soliditas pendukung, serta berusaha menggeser pihak-pihak yang dianggap menjadi penghambat agenda pemerintahannya.

Dalam situasi politik yang rumit, konsolidasi kekuasaan menjadi faktor penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Presiden tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan formal, tetapi juga harus memastikan bahwa

jajaran kabinet, partai pendukung, dan institusi negara bergerak sejalan dengan agenda pemerintah.

Persoalannya, upaya tersebut tidak selalu mudah. Hubungan antarelite politik dibangun melalui kepentingan dan kompromi yang tidak seluruhnya dapat diubah dalam waktu singkat.

Di sinilah tantangan Prabowo menjadi semakin berat. Ia harus menjaga koalisi, menjalankan program pemerintahan, sekaligus merespons kritik masyarakat yang menginginkan perubahan nyata.

Henri menggambarkan situasi politik saat ini sebagai war within, atau pertarungan di dalam lingkaran kekuasaan yang belum sepenuhnya selesai.

Istilah tersebut mencerminkan kemungkinan adanya persaingan kepentingan di antara berbagai kelompok elite yang berada dalam atau berdekatan dengan pemerintahan. Secara politik, situasi semacam ini dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, konsistensi kebijakan, dan kemampuan presiden menjalankan agenda perubahan.

NASIONAL

10 Tahun Berkuasa, Andi Sinulingga: Jokowi Lakukan Operasi Politik Jatuhkan Reputasi Politik Seseorang

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.07 WIB



BANDA ACEH - Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga melontarkan kritik terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik ijazah yang terus menjadi perbincangan publik.

Ia menyinggung berbagai operasi Politik yang menurutnya terjadi selama 10 tahun Jokowi berkuasa untuk menurunkan reputasi politik seseorang.

Melalui akun media sosial X, Andi mempertanyakan berapa banyak operasi politik yang dilakukan selama satu dekade pemerintahan Jokowi untuk merusak reputasi pihak-pihak tertentu.

"10 tahun bapak @jokowi berkuasa, ada berapa banyak operasi politik yg dilakukan untuk down grade reputasi politik seseorang?" tulis Andi Sinulingga, Senin (18/10/2026).

Ia kemudian melontarkan pernyataan bernada peringatan yang menyiratkan bahwa tindakan politik terhadap pihak lain dapat berbalik kepada pelakunya.

"Siapa yg suka menghunus pedang, akan mati di ujung pedang," lanjutnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik mengenai ijazah Jokowi yang masih menjadi perhatian publik.

Persoalan ini juga menyeret nama Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang kini menjabat Wakil Presiden RI.

Andi menilai, apabila ijazah yang dipersoalkan memang benar-benar ada, Jokowi seharusnya dapat menunjukkan dokumen tersebut sekaligus menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap melakukan fitnah.

"Kalau Ijazahnya nyata ada, kan operasi politiknya tak akan mempan juga pak @jokowi, tinggal tunjukkan saja & proses hukum semua yg sudah memfitnah bapak dan gibran," tulisnya.

Pernyataan Andi itu menempatkan persoalan ijazah bukan hanya sebagai perdebatan mengenai dokumen pendidikan, melainkan juga sebagai persoalan kepercayaan publik, komunikasi politik, dan pembuktian hukum.

Di satu sisi, pihak yang mempertanyakan ijazah menghendaki penjelasan dan bukti yang dapat diperiksa.

Di sisi lain, Jokowi dan keluarganya berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat tuduhan yang terbukti sebagai fitnah.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

2 Tahun Prabowo, Gibran Terasingkan di Istana: Di Rapat Kabinet Tak Diikut Sertakan

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.50 WIB



Presiden Prabowo Subianto sedang memimpin Rapat Kabinet. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pemandangan ganjil kerap mewarnai roda administrasi pemerintahan saat ini menjelang usianya yang genap dua tahun pada 20 Oktober 2026.

Sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terpantau semakin sering absen dari pusat pengambilan keputusan yang mana lebih sering dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatan terdapat indikasi marginalisasi secara sistematis atau upaya "melepehkan" kewenangan putra sulung mantan presiden tersebut dari lingkaran inti Istana.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai dokumentasi resmi pemerintahan, ia menemukan fakta bahwa sang wakil presiden

sering kali tereliminasi dari forum-forum pengambil kebijakan tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Prabowo.

"Bahkan kita melihat sendiri melalui rekaman-rekaman dan melalui siaran langsung dalam beberapa rapat kabinet, ia tidak diikuti sertakan. Jadi sebenarnya kita juga kurang jelas apa perannya. Jadi kalau saya sih melihat memang sangat minimal ya," ungkap Bivitri dikutip, Senin (19/10/2026).

Menurut Bivitri, ketidakhadiran wapres dalam sejumlah rapat kabinet ini dinilai bukan karena alasan teknis atau kebetulan semata, melainkan buah dari buruknya iklim kerja sama antara Prabowo dan Gibran.

Bivitri menyayangkan kondisi tersebut, mengingat dalam sistem presidensialisme murni, seorang wakil presiden selalu dilibatkan secara organik dan diberikan portofolio peran yang spesifik oleh presidennya.

Isolasi Gibran ini tampaknya berdampak sistemik terhadap rusaknya citra keseluruhan dari Kabinet Merah Putih.

Survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) September-Oktober 2026 menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tengah menghadapi krisis kepercayaan yang akut.

Penilaian dari kelompok ahli bersistem snowball sampling menunjukkan rapor kabinet sangat anjlok dengan nilai rata-rata 2,9 dari 10.

Mayoritas absolut, yakni 69 persen responden ahli, menjatuhkan nilai terburuk di rentang 1 hingga 3.

Bahkan, angka terendah absolut (nilai 1) menjadi pilihan dominan dengan persentase 29 persen responden ahli.

Sentimen negatif serupa juga terekam pada survei masyarakat umum, di mana 40 persen publik memberikan skor 1 hingga 3 untuk kabinet secara keseluruhan.

Terasingnya Wakil Presiden dari meja rapat kabinet disinyalir melahirkan persepsi kelumpuhan birokrasi, di mana roda pemerintahan dikesankan berjalan pincang tanpa adanya orkestrasi dwitunggal yang utuh di hadapan rakyat.

NASIONAL

Ibu-Ibu Teriak Depan DPR RI Minta Gibran di Makzulkan

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.34 WIB



JAKARTA – Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) melayangkan tekanan Politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2026), mereka mendesak DPR segera memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tuntutan tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang, menurut KNPRI, menjadi dasar untuk mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Aksi itu diwarnai kehadiran puluhan emak-emak yang mendominasi massa demonstrasi. Para peserta mengenakan hijab seragam bermotif bunga sembari membentangkan sejumlah poster berisi protes terhadap Gibran.

Koordinator Lapangan KNPRI, Meri Samiri, menilai DPR seharusnya tidak perlu menunggu tekanan massa untuk merespons persoalan yang mereka anggap berkaitan dengan putusan MK.

"(Putusan MK) sudah final and binding. Harusnya kalau DPR ini benar, (sebenarnya) enggak perlu didemo (dulu) dia menurunkan Gibran itu," kata Meri dikutip Senin (19/10/2026).

Bagi KNPRI, demonstrasi tersebut menjadi cara untuk mendesak

para wakil rakyat agar segera mengambil sikap.

Meri menegaskan, pihaknya berinisiatif menyampaikan protes secara langsung karena menilai keputusan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut kini berada di tangan DPR.

Namun, tuntutan KNPRI tidak berhenti pada desakan pemakzulan. Mereka juga menyerukan gerakan nasional untuk menurunkan foto Gibran yang dipajang di sekolah, kantor pemerintahan, hingga berbagai instansi swasta.

Putra sulung Presiden Ketujuh RI Joko Widodo itu dinilai oleh kelompok tersebut tidak lagi memiliki legitimasi untuk menduduki jabatan sebagai orang nomor dua di Indonesia.

"Gerakan nasional kita yang pertama adalah kami minta kepada seluruh sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian instansi pemerintah maupun swasta untuk segera menurunkan gambar dari Wakil Presiden," tegas Meri.

Seruan tersebut memperlihatkan bahwa KNPRI ingin memperluas tekanan, bukan hanya kepada DPR sebagai lembaga politik, tetapi juga melalui aksi simbolis di ruang-ruang publik.

Meski demikian, tuntutan pemakzulan yang disuarakan KNPRI merupakan sikap kelompok demonstran. Pelaksanaan pemakzulan tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusional yang berlaku.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Aktivist 98: Jokowi dan Gibran Menjadi Musuh Rakyat

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.10 WIB



Jayadi menyebut Jokowi dan Gibran adalah Musuh Rakyat Indonesia. FOTO/Illustrasi.

BANDA ACEH - Aktivist 1998 Jayadi Santoso melontarkan kritik keras terhadap Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai keduanya telah menimbulkan persoalan serius dalam kehidupan bernegara, mulai dari polemik dugaan ijazah

Jokowi hingga proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Jayadi bahkan menyebut Jokowi dan Gibran sebagai musuh rakyat.

Pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik politiknya terhadap perjalanan kekuasaan Jokowi selama dua periode menjabat sebagai presiden dan keterlibatan

keluarganya dalam Politik nasional. Menurut Jayadi, selama 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi telah meninggalkan sejumlah

persoalan yang dinilai merusak tatanan kehidupan bernegara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ADVERTORIAL



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda



Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

PDIP Sebut Dua Tahun Rezim Prabowo-Gibran Banyak yang Harus Dievaluasi

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.23 WIB



BANDA ACEH - DPP PDIP menilai banyak hal yang perlu dievaluasi setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga persoalan korupsi.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi terhadap pemerintahan tidak boleh sekadar menyenangkan penguasa, tetapi harus didasarkan pada persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat.

“Ya, tepat di hari esok itu dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya,” kata Djarot kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Djarot pun menyoroti karhutla yang semakin meluas dan menim-

bulkan penderitaan bagi makhluk hidup di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.

Menurutnya, pemerintah masih terjebak pada penanganan kebakaran hutan tanpa mampu melakukan antisipasi secara optimal. Padahal, ancaman fenomena El Nino yang dahsyat telah diperkirakan sebelumnya.

“Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi ya persoalan kebakaran hutan padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino yang dahsyat,” ujarnya.

Selain karhutla, Djarot mengkritik tata kelola program MBG. Ia menilai pemberian makanan bergizi kepada masyarakat merupakan langkah positif dan sejalan dengan konstitusi. Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi secara mendasar.

“Kalau kita memberikan gizi kepada masyarakat kita, itu bagus dan itu sejalan dengan konstitusi,” ucapnya.

“Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya, dan terbukti kepala BPG itu kena kasus,” sambung Djarot.

Persoalan berikutnya yang disoroti adalah program Koperasi Desa Merah Putih. Djarot mempertanyakan kejelasan konsep dan unit usaha koperasi tersebut, terutama ketika diarahkan untuk menjalankan berbagai kegiatan yang dinilai tidak memiliki perencanaan matang.

Ia mencontohkan rencana menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai toko serba ada, toko kelontong, hingga penyalur gaji aparatur sipil negara (ASN).

“Misalnya mendorong Koperasi Merah Putih sebagai toko serba ada, toko kelontong, sampai dengan menyalurkan gaji ASN. Hal seperti ini kan sebenarnya cari-cari proyek, artinya konsep tidak jelas padahal menghabiskan

dana sampai triliunnya, ya,” tegasnya.

Djarot menilai program dengan anggaran besar seharusnya memiliki konsep yang jelas, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi mendasar terhadap pelaksanaan Koperasi Merah Putih.

Di sisi lain, ia turut menyoroti persoalan pengangguran yang dinilai masih membutuhkan penanganan serius. Ia juga mengkritik maraknya kasus korupsi yang menyeret berbagai institusi.

“Termasuk satu lagi, tindak pidana korupsi. Hampir semua institusi terkena korupsi,” jelasnya.

Djarot menegaskan, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kondisi Indonesia belum sepenuhnya baik-baik saja setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

NASIONAL

Peta Koalisi Pilpres 2029 Mulai Terbaca, Prabowo-Puan vs AHY-Anies?

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.38 WIB



JAKARTA - Pakar ilmu Politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, memetakan sejumlah kemungkinan peta koalisi menuju Pilpres 2029.

Menurutnya, jika revisi Undang-Undang Pemilu mewajibkan calon presiden diusung minimal dua partai di DPR, jumlah pasangan calon berpotensi terbatas.

“Kalau benar DPR sahkan UU pemilu bahwa presiden harus dicalonkan minimal oleh 2 partai fraksi di DPR yang sekarang, maka pasangan capres maksimal 4,” kata Saiful dikutip dari unggahannya di X, Senin (19/10/2026).

Saiful menilai jumlah pasangan calon bisa menyusut menjadi tiga apabila Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN sepakat mengusung Prabowo Subianto.

Dalam skenario tersebut, PDIP berpeluang menjalin koalisi dengan NasDem, sementara Demokrat dan PKS diperkirakan membentuk poros tersendiri.

“Kalau benar Gerindra, Golkar, PKB, PAN nyalonin Prabowo, maka pasangan maksimal hanya akan 3,” imbuhnya.

“PDIP mungkin terpaksa koalisi dengan Nasdem karena dengan Demokrat dan PKS hampir tidak mungkin,” ungkapnya.

Namun, konfigurasi politik tersebut masih dapat berubah. Saiful menyebut PDIP berpeluang bergabung dengan Gerindra apabila tidak memilih berkoalisi dengan Nasdem, sedangkan Nasdem juga mungkin merapat ke Demokrat dan PKS jika peluang kemenangan dinilai terbuka.

“Lalu Demokrat koalisi dengan PKS. Ini bisa 3 calon. Tapi kalau PDIP tidak mau dengan Nasdem, mungkin bergabung dengan Gerindra dan wakil dari PDIP,” jelasnya.

Jika koalisi mengerucut menjadi dua poros, Saiful membuka kemungkinan Prabowo berpasangan dengan kader PDIP, seperti Puan Maharani atau Pramono Anung.

Di sisi lain, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpotensi berpasangan dengan Anies Baswedan, meski susunan tersebut bukan satu-satunya skenario yang mungkin terjadi.

“Kalau ini yang terjadi maka calon pasangan hanya 2. Prabowo-Puan/Pram Vs AHY-Anies/tokoh independen, atau Anies-AHY. Mungkin,” terang Saiful.

Saiful berharap DPR segera menyelesaikan pembahasan UU Pemilu agar ketentuan yang dinilai kurang inklusif masih memiliki waktu untuk diuji melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menginginkan aturan pencalonan yang memungkinkan setiap partai mengusung pasangan sendiri sehingga jumlah kandidat lebih banyak.

“Tapi saya berharap DPR segera putuskan UU Pemilu itu biar ada waktu untuk koreksi di MK dengan UU yang lebih inklusif untuk rekrut calon-calon lebih baik dengan UU yang membolehkan tiap partai mencalonkan pasangan sehingga calon menjadi lebih banyak,” paparnya.

Selain skenario koalisi tersebut, Saiful menilai Dedi Mulyadi atau KDM juga berpotensi diusung oleh koalisi di luar Gerindra.

Ia menyebut PDIP, Demokrat, dan Nasdem dapat membentuk poros alternatif apabila Gerindra tetap mengusung Prabowo.

“PDIP, Demokrat, Nasdem bisa punya calon sendiri. Mungkin KDM bisa ditampung sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat bila Gerindra tetap maksakan Prabowo. Ini agenda politik utama 2 tahun ke depan. Suka ataupun tidak,” pungkasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi Praperadilan Berulang, Rismon: Gugatan Kami Tak Dibaca

Oleh Redaksi · 19 Okt, 13.40 WIB



BANDA ACEH - Ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar menyoroti jawaban pemerintah dalam sidang uji materi aturan praperadilan berulang di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (19/10/2026). Dia menilai pemerintah tidak cermat memahami permohonan yang diajukan bersama enam rekannya hingga meminta MK menolak seluruh permohonan tersebut.

Rismon menilai jawaban Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej saat menanggapi pertanyaan hakim justru sejalan dengan substansi permohonan para pemohon.

"Tadi ya sepertinya pihak pemerintah dan presiden ini membuat jawaban itu ngantuk ya, sangat ngaco, ngaco banget gitu. Jadi intinya ya, pihak pemerintah, DPR, maupun presiden itu tidak membaca permohonan kami. Tidak membaca, langsung ditolak begitu," kata Rismon usai sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Rismon menjelaskan, permohonan tersebut berkaitan dengan pembatasan pengajuan praperadi-

lan terhadap berbagai bentuk upaya paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurutnya, para pemohon meminta agar berbagai bentuk upaya paksa yang telah terjadi dan diketahui sebelum permohonan diajukan dapat diperiksa dalam satu proses praperadilan, bukan melalui permohonan terpisah.

"Misalnya sudah tiga ya, pertama penetapan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, itu sudah terjadi. Tiga-tiga itu harus diuji pada praperadilan yang sama, tidak boleh diuji secara sendiri-sendiri!" ujarnya.

Rismon menilai pengajuan praperadilan secara berulang berpotensi menambah beban pengadilan negeri di berbagai daerah. Proses tersebut juga dinilai dapat meningkatkan penggunaan anggaran negara untuk membiayai persidangan.

"Saya sudah menampilkan ya potensi ekstrem jika praperadilan berulang ini ya dilakukan dan

menjadi status quo dalam SOP atau KUHAP kita," katanya.

Sementara itu, advokat Jahmada Girsang juga menyampaikan kekecewaan terhadap keterangan pemerintah dalam persidangan. Dia menilai pemerintah seharusnya memandang permohonan tersebut sebagai upaya memperbaiki norma KUHAP demi kepentingan penegakan hukum.

Menurut Jahmada, uji materiil itu bukan diajukan untuk kepentingan pribadi para pemohon, melainkan untuk memperjelas ketentuan hukum yang dinilai perlu diperbaiki.

"Kami datang ke sini untuk kepentingan penegakan hukum, bukan untuk menggugat, di sini menggugat kepentingan pribadi kami," ujarnya.

Jahmada berharap MK memberikan penafsiran terhadap ketentuan yang diuji agar berbagai bentuk upaya paksa yang telah diketahui dalam satu rangkaian perkara dapat diperiksa tanpa harus mengajukan praperadilan berulang kali.

"Jika ini dikabulkan, tentu penegakan hukum khususnya bagi ter-

sangka dalam mengajukan praperadilan itu dibatasi secara hukum. Jadi jangan terjadi seperti sekarang-sekarang ini," katanya.

Dia menegaskan, permohonan tersebut bertujuan memperkuat kepastian hukum sekaligus mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

"Ini masalah penting loh ya. Ini adalah masalah kemaslahatan bangsa dan negara. Bukan permohonan kami pribadi yang tujuh ini," ujarnya.

Dalam sidang tersebut, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan keterangan pemerintah terkait pengujian aturan praperadilan dalam KUHAP baru. Pemerintah meminta MK menolak permohonan para pemohon.

Dalam perkara Nomor 317/PUU-XXIV/2026, Edward menjelaskan Pasal 160 ayat (3) KUHAP membatasi permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa ...

NASIONAL

Said Didu Bongkar Pertemuan Jokowi & Prabowo Jelang Putusan MK: Jokowi Dibuat Menunggu 2 Jam!

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.34 WIB



BANDA ACEH - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai perombakan kabinet maupun pergantian Kapolri bukan solusi utama untuk mendongkrak popularitas Presiden Prabowo Subianto. Ia merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menurutnya belum menunjukkan peningkatan popularitas Prabowo.

Said Didu berpendapat, persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah keberadaan kelompok yang ia sebut sebagai "Geng Solo" dan oligarki. Menurutnya, perubahan Politik yang diharapkan masyarakat harus menyentuh persoalan tersebut, bukan sekadar mengganti sejumlah pejabat.

"Artinya, bukan itu penyakitnya. Sepertinya mereka harus sadari bahwa yang ditunggu masyarakat di sini adalah memang member-sihkan Geng Solo. Karena dulu kan saya katakan Solo oligarki Parcok. Kalau Parcoknya ditanya sudah dicabut, tapi Solonya dan oligarki masih ada," kata Said Didu melalui podcast Refly Harun Official, dikutip Senin (19/10/2026).

Ia juga menyinggung hasil survei SMRC yang disebutkan menunjukkan Prabowo tertinggal dari Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan dalam sejumlah indikator elektabilitas. Said Didu mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat memengaruhi posisi politik Prabowo jika tidak ada langkah lanjutan.

Salah satu hal yang disorotnya adalah tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai Prabowo perlu mengambil sikap tegas terhadap persoalan tersebut.

"Pak Presiden Prabowo mengambil sikap, nggak bisa diteruskan maka dibatalkan. Ini agak lembut. Maksudnya hampir seluruh partai sebenarnya tidak ada yang menghalangi, kecuali PSI. Makanya ini agak mulus," tutur Said Didu.

Selain itu, Said Didu mengaku heran karena mahasiswa belum turun menggelar demonstrasi. Ia juga menyebut perlawanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap Prabowo, menurut informasi yang diterimanya, semakin meningkat.

"Apalagi menurut saya perlawanan Pak Jokowi semakin hari semakin naik kepada Prabowo. Sampai saya dapat informasi, beliau (Jokowi) standby terus di Jakarta," ungkapnya.

Said Didu kemudian mengungkapkan informasi yang diterimanya mengenai pertemuan Jokowi dengan Prabowo pada 6 Oktober, menjelang pembacaan putusan MK terkait ijazah Gibran. Ia menyebut pertemuan tersebut tidak berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara dan Jokowi harus menunggu hingga dua jam.

"Lucu tuh bahwa mendatangi presiden untuk pada saat anaknya mau dibacakan hukum putusannya di MK," ujarnya.

"Saya dapat informasi bukan di Kertanegara. Dan saya dapat informasi Jokowi tunggu sampai dua jam. Artinya ini komplit," lanjutnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MAKI Minta KPK Jemput Paksa Nusron Wahid Sepulang dari Malaysia

Oleh Redaksi · 19 Okt, 13.45 WIB



BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap konsisten menjemput paksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Boyamin mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, perjalanan dinas Nusron ke Malaysia dijadwalkan berakhir pada Senin, 19 Oktober 2026. Ia menyebut Nusron semestinya kembali ke Indonesia melalui Batam atau langsung dari Singapura maupun Malaysia.

"Nusron Wahid akan berakhir perjalanan dinas ke Malaysia hari ini. Jadi dalam perjalanan dinas yang saya dapatkan itu sampai hari ini mulai hari Kamis kemarin dan semestinya Nusron Wahid akan pulang ke Indonesia baik melalui

Batam maupun langsung ke Indonesia baik dari Singapura maupun Malaysia," kata Boyamin kepada RMOL, Senin, 19 Oktober 2026.

Menurut Boyamin, apabila KPK masih berencana menjemput paksa Nusron, tim penyidik dapat menunggu kepulangannya di bandara.

"Jadi kalau KPK masih ingin menjemput paksa Nasron Wahid, maka silakan menyambutnya atau menyanggongnya di bandara malam nanti atau besok pagi," terangnya.

Selain itu, Boyamin menduga Nusron belum memperoleh izin dari Presiden Prabowo Subianto ketika silakan menyambutnya atau menyanggongnya di bandara malam nanti atau besok pagi," terangnya.

"Jadi dia hanya menyampaikan permohonan izin tapi belum diizinkan oleh Pak Presiden, tapi sudah langsung berangkat karena memang caranya mendadak baru direncanakan hari Rabu itu. Dan pengajuannya juga baru hari

Rabu, tapi belum dapat izin resmi, belum dapat ACC, tetap berangkat," ungkapnya.

Boyamin menilai, perjalanan dinas tersebut menunjukkan Nusron lebih mengutamakan agenda luar negeri dibandingkan agenda pemerintahan di dalam negeri. Ia menyinggung rapat kabinet yang disebutkan dijadwalkan pada Jumat, 16 Oktober 2026, tetapi Nusron tidak hadir dan hanya mengutus wakil.

Boyamin juga mempertanyakan urgensi perjalanan dinas Nusron ke Johor Bahru, Malaysia. Menurutnya, agenda tersebut tidak mendesak jika dibandingkan dengan kepentingan di dalam negeri.

"Sementara perjalanan dinas di Johor Baru, Malaysia, saya melihatnya itu tidak urgen karena setahu saya hanya jalan-jalan yang tidak ada protokolernya. Bisa saja Nasron Wahid mengatakan, 'Oh untuk ATR, untuk BPN, mengurus tata ruang,' karena memang di Johor Baru ada perumahan elit besar yang mangkrak, misalnya,

tapi itu tidak urgen sekali untuk dalam negeri," jelasnya.

Atas dasar itu, Boyamin berharap KPK tetap menjalankan langkah penjemputan paksa terhadap Nusron agar yang bersangkutan segera memberikan keterangan dan polemik terkait ketidakhadirannya dalam pemeriksaan dapat dihentikan.

"Jadi dengan demikian, saya berharap KPK tetap konsisten untuk menjemput paksa kepada Nasron Wahid untuk segera dimintai keterangan untuk menghentikan polemik yang sudah ada," pungkasnya.

Sebelumnya, Nusron Wahid mangkir dari panggilan tim penyidik untuk kedua kalinya. Yang pertama, Nusron mangkir saat diadagendakan pemeriksaan pada Rabu, 7 Oktober 2026. Saat itu ia menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.

NASIONAL

MAKI Desak KPK Cekal Nusron Wahid: Jangan Beri Ruang untuk Mangkir Lagi!

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.36 WIB



BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid (NW).

Desakan itu disampaikan menyusul keberadaan Nusron yang terpantau kembali berkantor di Jakarta pada Senin (19/10/2026).

Boyamin meminta KPK tidak berlari-lari dalam menyikapi ketidakhadiran Nusron dalam pemanggilan penyidik. Menurutnya, langkah pencegahan perlu segera dipertimbangkan untuk memastikan Nusron tetap berada di Indonesia dan dapat dimintai keterangan apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan.

"Wahai KPK, silakan segera jemput NW saat ini juga. Jika tidak berani jemput, bolehlah dikirim surat panggilan sekali lagi sesuai kajian," tegas Boyamin kepada Monitorindonesia.com, Senin (19/10/2026).

Ia juga mendesak KPK segera menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan Nusron kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

"KPK harus segera terbitkan surat cekal ke Dirjen Imigrasi untuk mencegah NW kabur lagi saat dipanggil ke KPK," ujar Boyamin.

Nusron Terpantau Kembali Berkantor

Pada Senin sore, Nusron terpan-tau berada di kantor Kementerian ATR/BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Berdasarkan penuturan sejumlah pegawai yang dikutip Boyamin, Nusron terlihat menjalankan aktivitas perkantoran seperti biasa.

Boyamin juga menyebut informasi yang sebelumnya ia sampaikan mengenai kemungkinan Nusron kembali ke Jakarta pada Senin atau Selasa mulai memperoleh konfirmasi dari keberadaan Nusron di ibu kota.

Menurutnya, Nusron berpotensi kembali berkantor pada Selasa pagi apabila tidak terdapat agenda perjalanan dinas luar kota. Namun, kepastian agenda tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui pihak Kementerian ATR/BPN.

Bagi MAKI, keberadaan Nusron di Jakarta menjadi momentum bagi KPK untuk menentukan langkah lanjutan. Boyamin meminta lembaga antirasuah itu tidak membiarkan proses pemanggilan berlari-lari tanpa kejelasan.

Desakan MAKI tersebut menempatkan KPK pada tuntutan untuk memberikan kejelasan mengenai langkah penyidik terhadap Nusron, termasuk kebutuhan pemeriksaan dan kemungkinan penerapan pencegahan ke luar negeri sesuai ketentuan hukum.

Hingga informasi ini disusun, desakan pencegahan tersebut merupakan permintaan MAKI. Keputusan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, maupun pencegahan ke luar negeri tetap menjadi kewenangan aparat berwenang berdasarkan kebutuhan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Peran Sertifikasi Halal dalam Mendorong Ketahanan Pangan dan Kepercayaan Konsumen

Lewat peraturan yang mempermudah produsen untuk mendapatkan sertifikat halal, baik masyarakat maupun produsen bisa lebih tenang dalam mengonsumsi makanan. Bagi warga umum, label yang ada jadi informasi yang bisa membantu mereka dalam memilih makanan tanpa ragu. Dan bagi

Untuk mendapatkan sertifikat ini, produsen harus menjalani serangkaian inspeksi yang dilakukan langsung oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kondisi di lapangan sudah sesuai dengan dokumen yang diberikan. Tidak hanya untuk verifikasi dokumen, rangkaian pemeriksaan juga melihat kebersihan dan bagaimana produsen mengikuti standar halal.

Karena memiliki peraturan yang cukup ketat tentang apa saja yang bisa dimakan, label halal membantu konsumen dalam memilih.

PDIP Tuding Balik Jokowi soal Operasi Politik: Maling Teriak Maling!

A man with glasses and a red jacket is smiling and adjusting a black cap on his head. He is wearing a black watch on his left wrist. The background is a plain, light-colored wall.

Ia menyinggung sejumlah peristiwa yang dinilainya sebagai bentuk operasi politik, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/2023 hingga proses penerbitan surat keterangan

Ia menegaskan, polemik ijazah Jokowi bukanlah operasi politik

"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," pungkas Jokowi.



www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas selalu mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankacel.co.id 1500000

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

NASIONAL

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Berpotensi Retak Jelang 2029

Oleh Redaksi · 19 Okt, 10.40 WIB



BANDA ACEH -Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi ujian bagi konsolidasi Politik di tengah besarnya koalisi pendukung pemerintah.

Dukungan lintas partai dan masuknya sejumlah figur dari kubu sebelumnya dinilai memperkuat jalannya pemerintahan, sekaligus menghadirkan tantangan dalam menyatukan beragam kepentingan politik.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategis Indonesia, Arifki Chaniago, menilai penataan kekuatan politik masih menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, agenda keberlanjutan yang diusung sejak Pilpres 2024 tidak serta-merta membentuk kekuatan politik yang mandiri.

"Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya.

Dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang menopang pemerintahan, tetapi tidak menghapus kebutuhan Prabowo untuk membangun kekuatan politik yang lebih solid dan mandiri, termasuk dengan membuka ruang komunikasi bersama Megawati maupun faksi-faksi lain dari Pilpres 2024," ujar Arifki kepada wartawan di Jakarta, Senin 19 Oktober 2026.

Menurut Arifki, masuknya sejumlah figur dari kubu oposisi merupakan strategi akomodasi untuk meredam gejolak dan menjaga stabilitas. Namun, semakin besar koalisi yang dibangun, semakin kompleks pula kepentingan yang harus dikelola.

"Akomodasi adalah instrumen menjaga stabilitas. Namun, semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda," ujarnya.

Arifki juga menyoroti keberadaan empat poros kekuatan politik di balik koalisi pemerintah, yakni Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan

Kartanegara. Keempat poros tersebut memiliki jaringan pengaruh dan orientasi politik yang tidak selalu sejalan.

Oleh karena itu, penyatuan kepentingan dinilai tidak cukup hanya melalui komunikasi rutin dan pembagian jabatan di pemerintahan. Koalisi besar tersebut harus mampu menjaga kesamaan arah kebijakan agar tidak sekadar tampak solid secara formal, sementara masing-masing kekuatan mulai menghitung peluang menuju Pilpres 2029.

"Secara formal, berbagai kekuatan bisa berada dalam satu pemerintahan. Namun, berada dalam satu koalisi tidak otomatis menyatukan seluruh kepentingan. Ada kepentingan jangka pendek dalam pemerintahan, tetapi ada juga kalkulasi jangka panjang terkait kepemimpinan nasional pada 2029," jelas Arifki.

Ia memperkirakan perbedaan kepentingan akan semakin terlihat ketika pembicaraan mengenai Pemilu 2029 mulai mengemuka. Koalisi yang saat ini tampak kompak berpotensi menghadapi

ujian ketika kalkulasi elektoral masing-masing partai dan kelompok politik semakin menguat.

"Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan. Mereka yang hari ini bekerja sama belum tentu memiliki pilihan yang sama ketika menentukan konfigurasi kekuasaan berikutnya," tegasnya.

Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, lanjut Arifki, akan menjadi pembuktian apakah akomodasi politik mampu berkembang menjadi soliditas jangka panjang atau sekadar menjadi gencatan senjata yang menyimpan persaingan di bawah permukaan.

"Tantangan Prabowo adalah memastikan akomodasi tidak berhenti pada pembagian ruang kekuasaan, melainkan menghasilkan dukungan konsisten terhadap agenda pemerintahan.

NASIONAL

Hakim: Putusan Praperadilan Tak Bisa Batalkan Dakwaan Roy Suryo terkait Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 19 Okt, 10.50 WIB



BANDA ACEH - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menyatakan putusan praperadilan terdakwa Roy Suryo tidak dapat membatalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pertimbangan itu dibacakan dalam sidang putusan sela, Senin (19/10/2026).

Ketua Majelis Hakim Christina Enderwati menegaskan, perlawanan yang diajukan tim penasihat hukum Roy Suryo tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan atau pun menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima.

"Perlawanan advokat terdakwa yang pada pokoknya menjadikan putusan praperadilan nomor 99/PID.PRA/2026/PN Jakarta Selatan sebagai dasar untuk menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima, adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima," ujar Christina di PN Jakarta Timur.

Christina menjelaskan, putusan praperadilan tersebut hanya menyatakan tidak sah tindakan terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Menurut majelis hakim, ketidakabsahan tindakan upaya paksa itu tidak otomatis membuat seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah.

"Tidak sahnya upaya paksa tidak menggugurkan kewenangan penuntut umum untuk menuntut dan tidak menyangkut syarat isi surat dakwaan menurut Pasal 75 ayat 2 KUHP," ungkap Christina.

Majelis hakim juga menilai persoalan alat bukti yang diperoleh melalui penggeledahan yang dinyatakan tidak sah harus dibedakan dari keabsahan surat dakwaan. Keabsahan dan nilai pembuktian alat bukti tersebut akan dinilai dalam pemeriksaan pokok perkara.

"Harus dinilai dalam pemeriksaan pembuktian pokok perkara," tutur Christina.

Selain itu, hakim menegaskan penentuan pasal dalam surat dakwaan merupakan kewenangan penuntut umum. Sementara itu, terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan diuji dalam pemeriksaan pokok perkara.

"Menimbang bahwa ketetapan pasal yang dicantumkan dalam laporan polisi bukan ukuran sahnya surat dakwaan," kata Christina.

Diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025, ketika Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya. Unggahan itu terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang pada pokoknya menuding ijazah S-1 Jokowi palsu.

Jaksa menilai Roy menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis foto ijazah Jokowi. Analisis tersebut, menurut jaksa, dilakukan tanpa verifikasi, konfirmasi, atau izin dari Jokowi selaku pemilik dokumen. Hasil analisis itu disebut digunakan untuk mendukung tuduhan bahwa ijazah S-1 Jokowi tidak asli.

Atas perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP serta ketentuan UU ITE, yakni Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1), sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ekspresi Sudaryono Saat Makan MBG di Sekolah Aceh Viral, Netizen: Gimana Pak?

Oleh Redaksi · 19 Okt, 08.58 WIB



BANDA ACEH - Ekspresi Sudaryono saat mencicipi menu MBG di sekolah Aceh viral di media sosial. Warganet pun penasaran.

Momen Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mencicipi hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah sekolah di Aceh Besar, Aceh, menjadi perhatian warganet.

Ekspresi wajahnya ketika menyantap makanan tersebut memancing rasa penasaran dan memicu beragam tanggapan di media sosial.

Peristiwa itu terjadi saat Sudaryono mengunjungi SD Negeri Cot Meuraja, Kabupaten Aceh Besar.

Kedatangannya merupakan bagian dari kegiatan peninjauan pelaksanaan program MBG yang menyasar para pelajar.

Dalam kunjungan tersebut, Sudaryono tidak hanya melihat proses penyelenggaraan program, tetapi juga berinteraksi dengan siswa dan guru.

Ia turut membagikan makanan kepada para siswa serta menanyakan secara langsung bagaimana program MBG dilaksanakan dan disalurkan di sekolah tersebut.

Namun, salah satu momen yang kemudian menarik perhatian publik adalah ketika Sudaryono mencicipi menu makanan yang disediakan.

Ekspresi wajahnya saat makan menjadi bahan pembicaraan, terutama setelah momen tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.

Sejumlah pengguna media sosial menanggapi ekspresi tersebut dengan rasa penasaran.

Pertanyaan seperti, “Gimana Pak?” menjadi gambaran respons yang muncul terhadap momen Sudaryono saat mencoba hidangan MBG.

Perhatian warganet itu membuat kunjungan yang semula berkaitan dengan peninjauan program pemerintah turut menjadi perbincangan di ruang digital.

Meski demikian, ekspresi wajah ketika seseorang mencicipi makanan tidak cukup untuk menyimpulkan apakah hidangan tersebut enak, kurang sesuai selera, atau memiliki persoalan kualitas.

Untuk mengetahui penilaian sebenarnya terhadap menu yang disajikan, diperlukan informasi

lebih lengkap mengenai makanan tersebut, termasuk komposisi, cita rasa, kandungan gizi, serta tanggapan siswa yang mengonsumsinya.

Di balik momen yang menjadi sorotan, kunjungan Sudaryono ke SD Negeri Cot Meuraja juga berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi anak sekolah.

Program MBG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi pelajar melalui penyediaan makanan.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga mutu hidangan yang diterima penerima manfaat.

Makanan yang disajikan kepada siswa perlu memperhatikan keseimbangan gizi, kesesuaian porsi dengan kebutuhan usia, keamanan bahan pangan, serta kebersihan selama proses pengolahan dan distribusi.

Selain itu, penerimaan siswa terhadap menu yang disediakan juga menjadi hal penting.

Makanan dengan kandungan gizi yang baik perlu disajikan secara layak agar dapat dikonsumsi dengan optimal oleh anak-anak.

Karena itu, peninjauan langsung ke sekolah dapat menjadi kesempatan untuk melihat pelaksanaan program sekaligus mengetahui kondisi di lapangan.

Informasi dari pihak sekolah, penyelenggara, dan siswa dapat membantu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan MBG.

Viralnya momen Sudaryono mencicipi menu MBG menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap program tersebut.

Ketika pejabat publik ikut mencoba makanan yang diberikan kepada siswa, tindakan itu dapat memunculkan rasa ingin tahu mengenai pengalaman mereka saat menyantap hidangan.

Meski begitu, perbincangan di media sosial

Ekspresi wajah bukan bukti tunggal untuk menilai mutu makanan ataupun keberhasilan program MBG.

NASIONAL

Saor Siagian Sentil Nusron: Janji Kooperatif Dinilai Omong Kosong!

Oleh Redaksi · 19 Okt, 08.52 WIB



BANDA ACEH – Komitmen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum kini menjadi sorotan.

Dua kali ketidakhadirannya dalam agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu desakan agar lembaga antirasuah mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan penerbitan surat perintah membawa sesuai ketentuan hukum.

Aktivis antikorupsi Saor Siagian secara terbuka mengkritik sikap Nusron.

Ia menilai pernyataan kooperatif yang sebelumnya disampaikan sang menteri tidak sejalan dengan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan terkait perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) yang menyeret sejumlah pihak.

“Kalau kita lihat pernyataan beliau yang secara terang benderang akan kooperatif, bullshit. Artinya ini cara pembohongan mengatakan dia akan kooperatif, faktanya adalah sebaliknya,” kata Saor dalam sebuah wawancara seperti dinukil Monitorindonesia.con, Minggu (18/10/2026).

Pernyataan keras tersebut muncul di tengah penyidikan perkara dugaan suap pengurusan sertifikat tanah di lingkungan ATR/BPN.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menyita barang bukti yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp106 miliar.

Bagi Saor, besarnya perkara dan posisi Nusron sebagai pejabat publik membuat persoalan ini tidak semestinya dipandang sebagai urusan administratif biasa.

Ia mendesak KPK menunjukkan ketegasan agar proses hukum tidak terkesan berbeda perlakuan ketika berhadapan dengan pejabat tinggi negara.

“Kasus ini sangat serius, sudah ditetapkan delapan tersangka, ditemukan barang bukti sekitar Rp106 miliar. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan di KPK untuk mem-

buat ruang kepada beliau, untuk tidak memanggil paksa,” ujarnya.

Dua Kali Absen, KPK Didesak Tidak Berhenti pada Pemanggilan

Saor menilai ketidakhadiran pejabat negara dalam pemeriksaan penegak hukum berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat apabila tidak ditindaklanjuti secara tegas.

Menurut dia, pejabat yang memperoleh mandat publik semestinya memberikan teladan dalam menghormati proses hukum, bukan justru memunculkan polemik mengenai kesediaannya memenuhi panggilan penyidik.

“Karena menurut saya ini mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, di sisi lain publik kita minta untuk memberikan keteladanan, tetapi ini adalah menteri yang diberi mandat, diberi pajak (gajinya dari pajak rakyat), tetapi tidak memberikan keteladanan,” kata Saor.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan yang tidak tegas dapat menimbulkan preseden buruk bagi pihak lain yang dipanggil KPK.

“Kita khawatir kalau KPK tidak memberikan wibawa dalam konteks ini, ini bisa preseden buruk kepada, katakanlah pihak-pihak yang berkaitan atau dipanggil KPK, bisa juga melakukan yang sama. Kita lihat waktunya cukup, dua minggu cukup. Nah oleh karena itu tidak perlu mempertimbangkan, beliau (Nusron) sudah harus dipanggil paksa,” tuturnya.

Desakan tersebut menempatkan KPK pada sorotan publik: bagaimana penyidik memastikan pemeriksaan berjalan efektif, sekaligus menerapkan prosedur hukum secara konsisten terhadap setiap saksi tanpa memandang jabatan.

Meski demikian, tindakan membawa paksa harus tetap mengacu pada ketentuan hukum dan mempertimbangkan status pemanggilan, alasan ketidakhadiran, serta prosedur yang berlaku.

Desakan Saor merupakan pandangan aktivis antikorupsi, bukan keputusan resmi KPK.

MAKI Soroti Perjalanan Nusron ke Malaysia

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Oleh Redaksi · 19 Okt, 08.35 WIB



Oleh:Rosadi Jamani

ANDA pernah melihat jalan baru tiga bulan sudah hancur? Aspal mengelupas, bangunan retak, trotoar bergoyang seperti pinggang ular kesetrum.

Anehnya, laporan keuangan pemerintah tetap WTP alias Wajar Tanpa Pengecualian. Statusnya dipajang di billboard segede dosa koruptor, seolah-olah negara baru menemukan teknologi mengubah kotoran menjadi bersih!

Jangan-jangan jalannya masuk rumah sakit, tetapi laporan keuangannya masuk surga. Beton meriang, rakyat mengumpat, pejabat tersenyum.

Tentu, proyek rusak bukan otomatis bukti suap. Namun, kalau auditor memperjualbelikan hasil pemeriksaan, ini bukan lagi sirkus. Ini Disneyland korupsi, tiketnya dibayar rakyat!

Mari mengenal Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Lahir di Jakarta, 13 Januari 1967, lulusan STAN 1989, sarjana dan magister hukum Universitas Padjadjaran.

Gelarnya berbaris seperti pasukan kerajaan: Ak., CA, CSFA. Penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun pun dikantonginya. Setelah mengabdikan lebih dari tiga dekade, pernah bertugas di BPK Papua Barat dan Gorontalo, ia menjabat Kepala BPK Jawa Tengah sejak Maret 2025.

Kekayaannya dalam LHKPN tercatat Rp7.279.869.539. Wuih! Gelar banyak, pengalaman panjang, harta miliaran. CV-nya bisa dipakai mengusir tuyul dari gedung kementerian. Namun, kebanggaan itu kini dibayangi perkara dugaan korupsi yang ditangani KPK.

Pada April 2026, ditemukan kelebihan pembayaran honorarium Pemerintah Kabupaten Klaten sekitar Rp5 miliar, terdiri atas Rp4,16 miliar honorarium narasumber dan Rp1,02 miliar kelebihan honor pelaksanaan kegiatan. Tugas auditor semestinya membongkar kegagalan. Namun, Ahmad Luthfi malah meminta Bupati Klaten, Hamenang, memberikan dukungan Rp600 juta.

“Tolong support kami Rp600 juta.”

Astaga, wak! Ini auditor atau aplikasi pinjaman daring menyamar memakai jas pejabat? Bedanya, aplikasi mengirim notifikasi, ini dugaan permintaannya langsung menyentuh jantung pemerintahan!

Negosiasi disebut berakhir pada angka Rp400 juta. Lalu muncul catatan kuning bertuliskan “kode AMIDIS” untuk urusan penyiapan uang. Sandi rahasia, catatan mungil, transaksi ratusan juta. James Bond mungkin langsung pensiun melihat intelijen kelas warung kopi begini!

Pada Juni 2026, ketika laporan hasil pemeriksaan diserahkan, dua temuan kelebihan pembayaran itu dikabarkan lenyap dari laporan. Temuan miliaran rupiah mendarak seperti jin masuk botol. Bukan cuma akal sehat terjungkal, kepercayaan rakyat pun ikut salto tanpa matras!

Kamis, 15 Oktober 2026, KPK menggelar operasi tangkap tangan. Sebanyak 20 orang terjaring, termasuk Hamenang dan Ahmad

Luthfi. Pada 16 Oktober 2026, Ahmad Luthfi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari pertama.

BPK menyatakan menghormati proses hukum dan akan memproses pelanggaran melalui Majelis Kehormatan Kode Etik. Bagus! Namun, kalau penjaga gawang ikut menjual bola, siapa mengawasi pertandingan?

Rakyat tidak butuh billboard WTP setinggi Monas. Rakyat butuh jalan tidak hancur sebelum cicilan proyek lunas, bangunan tidak retak sebelum gunting pita disimpan, dan auditor tidak menjadikan kebenaran sebagai barang obral.

Jika terbukti bersalah, hukum seberat-beratnya sesuai aturan dan rampas aset hasil kejahatan melalui mekanisme hukum. Sebab, WTP jangan sampai berubah menjadi Wajar Temuan Pindah! Jalan berlubang bisa ditambal. Namun, lubang kepercayaan rakyat akibat pengkhianatan jauh lebih sulit diperbaiki.

NASIONAL

Sapu Bersih Orang Jokowi di TNI-Polri, Ada Bocoran Target Reshuffle Prabowo Berikutnya

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.44 WIB



Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Jurnalis senior Hersubeno Arief menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai menyapu bersih orang-orang dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), khususnya di lingkungan TNI dan Polri.

Pada 1 Oktober 2026, Prabowo menggeser Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Sementara pada 16 Oktober 2026, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dicopot dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan kini resmi menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.

Hersubeno meyakini Prabowo akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih di masa mendatang, termasuk terhadap sejumlah sosok yang selama ini dianggap dekat dengan Jokowi.

"Tetapi dengan langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sekarang ini apalagi kemudian masih akan ada lanjut langkah lanjutan yakni reshuffle-reshuffle kabinet yang kemungkinan besar ada orang-orangnya Jokowi juga akan disingkirkan," ujarnya dalam

kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Senin (19/10).

"Anda jangan tanya dulu sama saya, saya sudah punya bocoran-nya. Tapi ini kan masih menunggu proses, tapi Anda sudah bisa duga-duga siapa orang-orang Jokowi yang akan segar disingkirkan. Dan saya kira dengan cara semacam ini ya Pak Prabowo bisa lebih nyaman," imbuhnya.

Menurut Hersubeno, salah satu posisi yang juga perlu segera mengalami pergantian adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang telah menjabat sejak 23 Oktober 2019.

"Satu lagi saya kira yang perlu segera dilakukan pergantian adalah Jaksa Agung. Kalau jaksa Agung memang tidak kental dia Joko Widodo-nya, tapi kan posisi atau dia juga menempati jabatannya cukup sudah cukup lama sejak eranya Joko Widodo pada periode kedua," ujarnya.

Ia menilai pergantian Jaksa Agung dapat dipandang sebagai bagian dari upaya penyegaran di pemerintahan Prabowo.

"Jadi kalau dia diganti itu bagian upaya pencegahan sajalah yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto," imbuhnya.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Warga Cilincing: Kok Bisa Ganti Rugi Rp27,6 Miliar Justru Dicairkan ke Yayasan Milik Jusuf Hamka?

Oleh Redaksi · 19 Okt, 10.55 WIB



BANDA ACEH – Keluarga ahli waris David Wahyuna mempertanyakan pencairan dana konsinyasi proyek Polder Cilincing, Jakarta Utara senilai Rp27,62 miliar kepada Yayasan Daya Besar pada 2021.

Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri dasar hukum dan proses administrasi pencairan dana yang diklaim berkaitan dengan tanah warisan keluarga.

Perwakilan keluarga ahli waris, Nikodemus Jansen mengatakan pihaknya tidak menerima dana ganti rugi tersebut. Padahal, keluarga mengklaim memiliki hak atas tanah yang menjadi objek pembebasan untuk proyek pengendalian banjir di Cilincing.

Persoalan itu kembali disuarakan dalam konferensi pers di depan kantor Yayasan Daya Besar, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (14/10/2026).

Nikodemus hadir bersama pendamping hukum dari Yayasan Peduli Bantuan Hukum (Yapbakum) Gardapatih.

Berdasarkan dokumen Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dirujuk keluarga, dana konsinyasi sebesar Rp27.625.965.000 dicairkan pada 6 Oktober 2021 kepada Hariputra Yoseph selaku penerima kuasa Yayasan Daya Besar. Pencairan tersebut berkaitan dengan Penetapan Nomor 31/Pen.Kons/2018/PN Jkt.Utr.

Keluarga mempertanyakan dasar penetapan penerima dana tersebut, terutama karena mereka mengklaim masih memiliki hak atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa.

Pembina Yapbakum Gardapatih, Denny Maulana, mengatakan pihaknya menemukan dokumen administrasi yang menurut mereka perlu diperiksa lebih lanjut. Salah satu yang dipersalahkan ialah proses verifikasi dalam pengambilan dana konsinyasi.

“Jurnal diambil tanpa verifikasi,” kata Denny.

Pihak ahli waris meminta pengadilan dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai tahapan pencairan dana, termasuk

dokumen yang digunakan, identitas penerima, serta dasar hukum penyerahan uang kepada pihak yang diberi kuasa oleh Yayasan Daya Besar milik keluarga Jusuf Hamka.

Mereka juga meminta aparat menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi pencairan. Dugaan penyimpangan yang disampaikan keluarga tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lembaga berwenang.

Persoalan ini sebelumnya telah dilaporkan ke sejumlah lembaga. Pada 27 November 2025, keluarga mengadukan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman Republik Indonesia. Mereka kemudian menyampaikan pengaduan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 5 Agustus 2026.

Pada 18 September 2026, pengaduan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Selanjutnya, pada 5 Oktober 2026, Yapbakum Gardapatih

mengirimkan pengaduan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Pratikno.

Nikodemus berharap pengaduan tersebut ditindaklanjuti agar keluarga memperoleh kepastian mengenai pihak yang berhak atas dana ganti rugi.

“Saya minta kepada Bapak Presiden Pak Prabowo, tolong bantu orang rakyat ini,” ujar Nikodemus.

Sementara itu, iNews Media Group (IMG) telah menghubungi Jusuf Hamka melalui pesan singkat untuk meminta tanggapan mengenai persoalan tersebut. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons. Surat elektronik yang dikirimkan kepada Yayasan Daya Besar juga belum mendapat jawaban.

Keluarga berharap pemeriksaan menyeluruh dapat menjelaskan dasar pencairan dana konsinyasi Rp27,62 miliar sekaligus memberikan kepastian hukum atas klaim hak mereka

NASIONAL

Ahmad Khozinuddin Sebut Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Pemalsuan Suket Ijazah Gibran 21 Oktober

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.27 WIB



BANDA ACEH - Bareskrim Polri dijadwalkan menggelar perkara khusus terkait laporan dugaan pemalsuan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (21/10/2026) mendatang.

Hal ini disampaikan anggota Tim Advokasi Penegak Moral Etika dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinuddin setelah mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, pelapor bernama Syamsudin telah menerima dua dokumen dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Dokumen tersebut berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan undangan gelar perkara khusus.

“Kami kemarin sudah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan surat undangan gelar perkara yang ditujukan kepada pelapor, Pak Syamsudin,” ujar Ahmad Khozinuddin kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, berdasarkan surat undangan yang diterima, gelar perkara khusus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Subdit IV Dittipidum, Gedung Bareskrim Polri lantai 4.

Dia menyebut pihaknya telah menemui penyidik yang menangani perkara tersebut untuk mengonfirmasi agenda gelar perkara. Tim pelapor juga berencana menghadiri kegiatan itu dengan membawa dokumen pendukung.

“Kami tadi sudah bertemu dengan penyidik, Bapak Arif, dan beliau membenarkan adanya jadwal agenda gelar perkara khusus tersebut. Insya Allah kami beserta klien akan hadir membawa seluruh dokumen pendukung,” katanya.

Sementara itu, Syamsudin mengatakan laporan tersebut diajukan untuk mendorong penegakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dia menyoroti ketentuan mengenai persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Undang-Undang Dasar menyatakan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden harus lulusan SLTA sederajat, bukan sekadar surat keterangan hadir belajar. Kami meminta agar aturan hukum ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih,” kata Syamsudin.

Pihak pelapor berharap gelar perkara khusus berlangsung secara objektif dan transparan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah disampaikan kepada penyidik

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

PSI Yakin Putusan MK soal Ijazah Gibran Tak akan Berlanjut di DPR

Oleh Redaksi · 19 Okt, 15:53 WIB



Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali meyakini putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak akan berlanjut di DPR.

Menurutnya, MK hanya melakukan atraksi Politik, karena putusan tersebut secara tegas menolak gugatan yang diajukan Denny Indrayana dkk.

"Kalau saya bilang itu atraksi politik Mahkamah Konstitusi. Sesuatu hal yang sejak awal diketahui bahwa yang bersangkutan tidak punya legal standing, tapi masih kegenitan untuk masuk melakukan pemeriksaan hal-hal yang pada akhirnya membuat kegaduhan," kata Ahmad Ali ditemui di kantor DPP PSI, Jakarta, Senin (19/10).

Menurutnya, meski pertimbangan putusan menyebutkan tidak ditemukan ijazah SMA sederajat Gibran, tetapi amar putusan MK

secara tegas menolak gugatan tersebut.

"Kalau ditolak, apa yang bisa diambil dari situ? Kalau orang tersebut tidak memiliki legal standing untuk menggugat, apa yang bisa diambil dari putusan itu?" tegasnya.

Karena itu, ia meyakini DPR tidak akan menindaklanjuti putusan MK tersebut. Sebab, MK pada dasarnya menolak gugatan tersebut.

"Apa yang mau dijalankan di DPR kalau tidak ada putusan? Pengadilan tidak memutuskan apa-apa, gugatannya ditolak," tuturnya.

Ia mengungkapkan, Gibran memang tidak mengenyam pendidikan SMA. Karena pendidikan di luar negeri diklaim tidak mengenal SMA.

Namun, ia menegaskan bahwa Gibran tidak mungkin bisa menempuh pendidikan tinggi jika

tidak melewati proses pendidikan yang berjenjang.

"Masa integritas universitas di Singapura, di Australia kalah daripada universitas di Indonesia? Mereka menerima murid yang tidak memenuhi persyaratan?" ucapnya.

"Kalau seandainya Gibran tidak memiliki pendidikan yang setara seperti yang dituduhkan, kok universitas di Singapura mau menerima dia?" tambahnya.

Lebih lanjut, Ahmad Ali memastikan pendidikan yang ditempuh Gibran di luar negeri sangat berintegritas dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.

"Apakah kita ingin mengatakan universitas tempat Gibran sekolah itu tidak punya integritas? Jauh lebih berintegritas universitas di Indonesia? Saya pikir tidak juga. Ini bisa memicu ketersinggungan dua negara menurut saya," pungkasnya.

NASIONAL

Nusron Dipanggil KPK, Malah Main Petak Umpet!

Oleh Redaksi · 19 Okt, 08:49 WIB



BANDA ACEH — Dua kali pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum berujung pada kehadiran yang dikonfirmasi.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pejabat negara dalam memenuhi panggilan lembaga antirasuah, terutama setelah Nusron menyatakan akan menghormati dan mendukung proses hukum.

Nusron kembali dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis, 15 Oktober 2026. Namun, hingga siang menjelang sore, belum ada konfirmasi bahwa politikus Partai Golkar tersebut telah memenuhi panggilan penyidik.

Absennya Nusron dalam pemanggilan kedua itu menjadi sorotan setelah sebelumnya ia juga tidak hadir pada panggilan pertama, 7 Oktober 2026. Saat itu, alasan agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN menjadi latar belakang ketidakhadirannya.

Ketua KPK Setyo Budiyoant mengatakan sempat menyinggung persoalan manajemen waktu Nusron. Padahal, surat pemanggilan pertama disebut telah dikirimkan sejak pekan sebelumnya.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan kehadiran Nusron dalam sorotan publik. Sebab, sebagai pejabat negara, pemenuhan

panggilan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam mendukung proses penyidikan.

Janji Mendukung KPK Berhadapan dengan Fakta Ketidakhadiran

Pada 18 September 2026, Nusron disebut telah menyatakan komitmennya untuk menghormati, mendukung, dan membantu proses hukum yang berjalan.

KPK kemudian kembali memanggilmnya untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Setyo Budiyoant mengingatkan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan kesempatan bagi Nusron untuk memperjelas persoalan yang tengah diselidiki.

"Ini kesempatan untuk memperjelas," kata Setyo dikutip Senin (19/10/2026).

Namun, belum adanya konfirmasi kehadiran Nusron dalam pemanggilan kedua memunculkan pertanyaan baru. Publik kini menanti penjelasan mengenai ketidakhadiran tersebut sekaligus langkah yang akan ditempuh KPK selanjutnya.

Di media sosial X, sejumlah warganet menyuarakan kritik. Ada yang mempertanyakan sikap Nusron, ada pula yang mendesak KPK mengambil langkah tegas agar proses hukum tidak terkesan berjalan lamban ketika berhadapan dengan pejabat berpengaruh.

Perbandingan dengan pejabat lain yang dicopot setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) juga muncul dalam perbincangan

warganet. Meski demikian, penilaian di media sosial tidak dapat menggantikan proses hukum dan pembuktian oleh aparat berwenang.

Kasus OTT

Perkara yang menyeret perhatian terhadap lingkungan Kementerian ATR/BPN ini bukan perkara sepele. Dalam OTT pada 14 September 2026 di wilayah Jabodetabek, KPK menyita uang tunai senilai Rp106,3 miliar dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat di antara para tersangka disebut sebagai orang kepercayaan Nusron. Fakta tersebut membuat pemeriksaan terhadap sang menteri dinilai penting untuk membantu penyidik mengurai perkara secara menyeluruh.

Meski demikian, posisi hukum Nusron perlu ditegaskan secara proporsional. Ia dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi, bukan tersangka. Pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang bersalah, tetapi keterangannya dapat dibutuhkan untuk menjelaskan fakta yang sedang didalami penyidik.

Karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar apakah Nusron hadir atau tidak. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana proses hukum dapat berjalan efektif, transparan, dan tanpa kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pejabat negara.

KPK Ditunggu Ketegasannya

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Bank Aceh

AcTion

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

Roy Suryo Hadapi Sidang Putusan Sela Dugaan Pencemaran Nama Baik Jokowi

Oleh Redaksi · 19 Okt, 09.06 WIB



BANDA ACEH - Terdakwa kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), pada Senin (19/10).

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaktim, sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan sela oleh majelis hakim.

"Jadwal sidang: Senin, 19 Oktober 2026. Agenda: putusan sela," demikian informasi yang tertera di SIPP PN Jakarta Timur.

Persidangan dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di ruang sidang utama PN Jaktim. Putusan sela tersebut akan menentukan kelanjutan pemeriksaan perkara setelah majelis hakim mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas nota perlawanan yang diajukan pihak Roy Suryo.

Adapun, putusan sela merupakan keputusan yang dijatuhkan hakim sebelum putusan akhir perkara. Putusan ini umumnya berkaitan dengan keberatan terhadap dakwaan atau persoalan prosedural yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Sebelumnya, pada persidangan Senin (5/10), jaksa meminta majelis hakim menolak nota perlawanan yang diajukan Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi.

Jaksa berpendapat surat dakwaan yang disusun dan diajukan terhadap Roy Suryo telah memenuhi ketentuan formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

"Kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela

sebagai berikut: satu, menolak perlawanan atau menyatakan perlawanan advokat terdakwa Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tidak dapat diterima," kata jaksa.

Selain meminta eksepsi ditolak, jaksa juga memohon agar majelis hakim menegaskan kewenangan PN Jakarta Timur untuk mengadili perkara tersebut.

"Dua menyatakan Pengadilan Jakarta Timur berwenang mengadili perkara," tegas jaksa.

Jaksa turut meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan terhadap Roy Suryo telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP.

Roy Suryo Didakwa Mencemarkan Nama Baik Jokowi

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan tindakan yang dinilai menyerang kehormatan dan nama baik Joko Widodo melalui sarana teknologi informasi. Jaksa menilai tuduhan mengenai keas-

lian ijazah Jokowi disebarkan kepada khalayak tanpa dasar pembuktian yang sah.

Jaksa juga menilai penyebaran narasi tersebut dilakukan secara sengaja agar diketahui masyarakat luas, meskipun menurut penilaian penuntut umum, tuduhan itu bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Perkara dugaan pencemaran nama baik tersebut bermula pada 26 Maret 2025. Saat itu, ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitri-ansyah, menemukan sejumlah konten digital di media sosial yang diunggah oleh Roy Suryo.

Dalam materi perkara, terdapat tiga unggahan yang menjadi bagian dari bukti yang diperiksa. Dua di antaranya berupa video di platform YouTube yang dinilai mendiskreditkan keabsahan dokumen akademik Jokowi.

NASIONAL

Kalau Gibran Sampai Dimakzulkan, Sekjen PROJO: Akan Ribut Besar Lagi!

Oleh Redaksi · 19 Okt, 20.24 WIB



BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal Ormas Penyelamat Ormas dan Relawan Jokowi (PROJO), Freddy Alex Damanik, mengingatkan bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memicu gejolak Politik nasional serta mengguncang keseimbangan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Freddy mempertanyakan kesiapan elite politik dalam menghadapi konsekuensi jika proses pemakzulan tersebut benar-benar bergulir.

"Pertanyaan yang paling mendasar hari ini adalah, siapa yang mau menggantikan Gibran? Kalau dia dimakzulkan, itu ribut besar lagi," ujar Freddy.

Menurut Freddy, isu pemakzulan Gibran tidak boleh dipandang secara dangkal sekadar pergantian figur semata. Perubahan pada posisi Wakil Presiden diyakini bakal memengaruhi konfigurasi koalisi, relasi kekuatan antarpolisi pendukung, hingga stabilitas jalannya roda pemerintahan.

Ia menilai wacana tersebut berpotensi membuka kembali perde-

batan rumit mengenai representasi politik dan pembagian peran di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Freddy meragukan adanya figur alternatif yang bisa diterima semua pihak tanpa memicu gesekan baru di tingkat elite.

Lebih lanjut, Freddy mengaitkan polemik ini dengan langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mendukung duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

Ia mengutip penjelasan Jokowi terdahulu bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga keutuhan koalisi agar tidak terpecah dan memastikan keberlanjutan agenda pembangunan nasional.

Mengingat pergeseran peta dukungan politik kerap menimbulkan ketegangan antarpolisi, Freddy mengingatkan bahwa dinamika serupa bukan tidak mungkin terulang menjelang kontestasi Pilpres 2029 mendatang.

"Bukan tidak mungkin skenario itu bisa terulang di 2029," jelasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mangkir Kasus Suap HGB, Nusron Wahid Diduga “Kabur” ke Luar Negeri Tanpa Izin Presiden

Oleh Redaksi · 19 Okt, 16.01 WIB



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid diduga melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mengantongi izin resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Keberangkatan tersebut bertepatan dengan panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Mangkirnya Nusron untuk kedua kalinya ini memicu sorotan tajam, terlebih kepergiannya ke Johor Bahru, Malaysia, dinilai tidak memiliki agenda dinas yang mendesak.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan

bahwa keberangkatan Nusron dilakukan secara mendadak pada Rabu pekan lalu tanpa persetujuan Istana. Nusron bahkan absen dalam rapat kabinet penting yang dipimpin Presiden pada Jumat (16/10/2026).

"Nusron Wahid diduga tidak mendapatkan izin dari Presiden. Dia hanya menyampaikan permohonan izin tapi belum diizinkan, lalu langsung berangkat," ujar Boyamin, Senin (19/10/2026).

Boyamin menyebut masa perjalanan Nusron di Malaysia berakhir hari ini dan mendesak penyidik KPK untuk bertindak tegas menghadang kedatangannya di pintu masuk Indonesia.

"Kalau KPK ingin menjemput paksa Nusron Wahid, silakan menyambutnya di bandara malam nanti atau besok pagi," tegasnya.

Upaya Paksa

KPK mengonfirmasi telah melacak keberadaan Nusron di luar negeri dan tengah mengkaji opsi penjemputan paksa demi efektivitas penegakan hukum.

"Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk opsi jemput paksa, karena KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka dan melakukan penahanan di Rutan Gedung Merah Putih. Para tersangka tersebut antara lain Sontang Coin Manurung Kepala Kantah Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adhi Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.

TERSANGKA LAINNYA

Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Ketua DPP Golkar Fahd El Fouz (Fahd A Rafiq), Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry yang merupakan pihak yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid serta Rizal Pahlevi dari swasta.

Sikap bungkam masih ditunjukkan pihak Istana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, enggan memberikan penjelasan rinci mengenai status izin perjalanan dinas sang menteri.

"Nanti, saya belum dapat kabar resmi. Baru selesai rapat," katanya.

NASIONAL

Dudung Beber Alasan Karhutla Belum Ditetapkan Bencana Nasional: Pemerintah Masih Sanggup

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.42 WIB



BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkap alasan belum ditetapkannya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menurutnya, pemerintah masih sanggup menangani kebakaran tersebut dengan kemampuan yang dimiliki saat ini. "Masalah penerapan bencana nasional, ya. Ya, sementara kita masih sanggup, ya, negara kita masih sanggup," kata Dudung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dudung juga mengungkapkan Malaysia telah menawarkan bantuan untuk penanganan karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Bantuan tersebut berupa tiga helikopter dan puluhan personel.

Meski begitu, Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu belum mengonfirmasi apakah pemerintah pusat akan menerima bantuan tersebut.

"Nah, kemarin juga ada dari Malaysia akan memberikan ban-

tuan. 3 heli, kemudian 52 personel," kata Dudung.

Lebih lanjut, Dudung menjelaskan, penanganan karhutla tidak serta merta menerima bantuan, tetapi juga kerap mengalami kendala teknis di lapangan. Salah satunya gangguan tersebut ialah distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pemadaman.

"Ini juga banyak kendala-kendala, ya, masalah distribusi BBM dan sebagainya. Tapi untuk sementara kita masih sanggup lah," kata Dudung.

Sementara itu, Dudung menyebut, meski penanganan karhutla masih dinilai mampu dilakukan oleh pemerintah, kondisi di lapangan tetap menjadi tantangan yang harus diperhitungkan. Hal ini terutama berkaitan dengan kebutuhan teknis selama proses pemadaman berlangsung.

"Tapi memang begitu sulitnya bila menangani permasalahan-permasalahan kabut asap ini. Tidak semudah apa yang kita bayangkan," pungkasnya.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Kubu Roy Suryo Desak Ijazah Jokowi Dihadirkan di Sidang: Barang Bukti Utama

Oleh Redaksi · 19 Okt, 13.36 WIB



BANDA ACEH - Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangadji meminta majelis hakim menghadirkan ijazah asli Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dia menilai dokumen tersebut merupakan barang bukti utama yang diperlukan dalam proses pembuktian.

"Kami minta melalui majelis hakim yang mulia supaya barang bukti utama yaitu ijazah yang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dan sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, mohon untuk dihadirkan pada pembuktian," ujar Ghafur dalam sidang pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (19/10/2026).

Ghafur menilai kehadiran ijazah asli diperlukan agar majelis hakim dapat menilai kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti. Selain itu, dokumen tersebut dinilai penting bagi tim kuasa hukum untuk mengonfirmasi sejumlah hal kepada saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).

"Jadi jangan sampai nanti minggu depan begitu ada saksi yang menyatakan pernah melihat barang bukti itu, kemudian kami ingin mengonfirmasi kepada saksi yang menyatakan sudah pernah lihat barang bukti itu, dan kemudian penuntut umum memberikan alasan bahwa belum sempat dihadirkan," tutur dia.

Menanggapi permintaan tersebut, JPU menyinggung Pasal 210 ayat (3) KUHP. Jaksa menyatakan kewenangan untuk mengha-

dirkan saksi dan barang bukti sesuai urutan yang ditentukan berada pada penuntut umum.

"Kami akan menghadirkan saksi sesuai dengan urutan yang kami tentukan, didukung oleh barang bukti yang relevan yang mana itu masih dalam proses dan kewenangan kami untuk menghadirkan," ujar jaksa.

Meski demikian, jaksa menyatakan akan memperhatikan permintaan agar seluruh barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut dapat dihadirkan dalam persidangan.

"Namun demikian, kami akan memperhatikan untuk menghadirkan keseluruhan dari barang bukti dan juga saksi sesuai dengan rencana persidangan yang akan kami sampaikan kemudian," lanjut jaksa.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Timur menyatakan nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan Roy Suryo tidak dapat diterima. Putusan sela tersebut dibacakan Senin (19/10/2026).

"Mengadili menyatakan perlawanan advokat terdakwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati.

Hakim kemudian memerintahkan JPU melanjutkan pemeriksaan perkara yang menjerat Roy Suryo. Dengan putusan sela tersebut, perkara akan berlanjut ke tahap pembuktian, termasuk pemeriksaan saksi dan alat bukti yang diajukan di persidangan

NASIONAL

Said Didu Ungkap Bakal Ada 'Radical Break' pada 20 Oktober, Sisa-Sisa Geng Solo Diganti Semua

Oleh Redaksi · 19 Okt, 19.30 WIB



Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memprediksi akan terjadi gebrakan Politik besar (radical break) pada Selasa (20/10/2026).

Ia menyebut momentum tersebut berpotensi diwarnai pergantian sejumlah pejabat penting di kabinet hingga dinamika politik terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Said Didu, pergeseran posisi menteri diyakini menyasar sejumlah pos strategis demi memperbaiki kinerja ekonomi dan tata kelola nasional.

"Akan ada radical break pada tanggal 20 Oktober, ada penggantian Menko Bidang Perekonomian untuk memperbaiki ekonomi, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN, dan

Panglima," ujar Said Didu dalam sinar bersama Refly Harun, Senin (19/10).

Said Didu menilai pergerakan sipil dan konstelasi partai politik saat ini mulai menunjukkan titik balik.

Ia menyinggung dinamika politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik keabsahan ijazah yang menyeret nama Gibran.

Ia mengklaim hampir seluruh partai politik di parlemen cenderung pasif dan tidak menghalangi wacana proses politik terhadap Gibran.

"Saya lihat agak lembut, tidak ada partai yang menghalangi proses pemakzulan Gibran, kecuali PSI," lanjutnya.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Pengacara Senior Kamaruddin Simanjuntak Meninggal Dunia

Oleh Redaksi · 19 Okt, 13.48 WIB



Pengacara senior Kamaruddin Simanjuntak. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pengacara senior Kamaruddin Simanjuntak meninggal dunia pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 03.00 WIB saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Ia diketahui mengidap penyakit ginjal.

Kabar duka tersebut dikonfirmasi rekan sesama pengacara, Poltak Silitonga. Kepergian Kamaruddin membuat Poltak terpukul, terlebih kondisi kesehatan rekannya itu sempat dikabarkan membaik sebelum kembali memburuk.

Nama Kamaruddin dikenal luas setelah menangani sejumlah per-

kara hukum yang menyita perhatian publik.

Salah satu yang paling menonjol ialah saat menjadi kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdys Sambo.

Selain kasus Brigadir J, Kamaruddin juga menangani sejumlah perkara publik lainnya. Sosoknya dikenal vokal dalam mengawal berbagai persoalan hukum di Indonesia.

Kepergian Kamaruddin menjadi kabar duka bagi rekan sejawat dan dunia hukum Tanah Air.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



2 Pria di Kendal Berkelahi Memperebutkan Janda, Satu Tewas



Gerindra Jurukunci Penyelesaian Polemik Ijazah Gibran



Dampak Karhutla Meluas, Presiden Diminta Ganti Menteri Terkait



www.harianaceh.co.id

ADVERTORIAL



NASIONAL

Kepuasan Publik terhadap Prabowo Bukan karena Pencitraan

Oleh Redaksi · 19 Okt, 13.32 WIB



BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih mengutamakan kerja nyata dibandingkan membangun citra di hadapan publik. Hal itu tercermin dari sejumlah capaian pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tetap terjaga.

Jurubicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan pihaknya menghormati hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mencapai 65,4 persen.

Meski demikian, Sugiat menilai kinerja pemerintah perlu dilihat secara objektif melalui indikator pembangunan, bukan semata-mata persepsi publik.

“Pak Prabowo ini tidak membangun pemerintahannya berbasis

pencitraan. Dia tidak terlalu peduli dengan basa-basi pesan. Mungkin ini katakana bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan beliau,” kata Sugiat, Senin, 19 Oktober 2026.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang, berdasarkan data yang disampaikan, mencapai 5,29 persen pada semester II 2026. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan perekonomian nasional masih berada pada jalur yang baik dibandingkan sejumlah negara lain.

Sugiat juga menyoroti kontribusi konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam melihat kondisi daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, Sugiat memandang penilaian terhadap kinerja pemerintahan saat ini tidak terlepas dari dinamika pembentukan opini publik di era digital.

Menurutnya, persepsi masyarakat tidak selalu terbentuk berdasarkan angka-angka pembangunan, tetapi juga dipengaruhi potongan video, konten media sosial, dan narasi yang beredar di ruang digital.

“Satu konten yang diposting katakana netizen itu bisa mempengaruhi opini publik walaupun sesungguhnya itu bukan fakta sebenarnya,” jelasnya.

Karena itu, Sugiat menekankan pentingnya menilai pemerintahan Prabowo secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian pembangunan dan indikator ekonomi, di samping hasil survei persepsi masyarakat.

Sementara itu, survei PPI yang dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 mencatat 62,3 persen responden menyatakan puas dan 2,9 persen sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

Dalam pemetaan program pemerintah, bantuan sosial menempati posisi teratas sebagai program yang dinilai paling baik oleh masyarakat. Berikutnya adalah Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), program sekolah gratis hingga perguruan tinggi, serta cek kesehatan gratis.

Survei tersebut melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 2,83 persen.

NASIONAL

Polisi Tembak Polisi, Ini Tampang Bharada Andika yang Habisi Bharatu Valdo

Oleh Redaksi · 19 Okt, 14.53 WIB



Bharada Andika Ramadhani, pelaku penembakan seniorinya, Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lewai (LVF), di Markas Direktorat Polisi Udara (Ditpoludara) Korpolaairud

BANDA ACEH - Bharada Andika Ramadhani, pelaku penembakan seniorinya, Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lewai (LVF), di Markas Direktorat Polisi Udara (Ditpoludara) Korpolaairud Baharkam Polri, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, telah ditahan Jatnarras Polda Metro Jaya.

Dalam foto yang beredar, pelaku tampak mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Ia mengenakan jaket berwarna merah.

Sumber kumparan di kepolisian membenarkan bahwa foto tersebut adalah sosok Andika.

Pengacara keluarga korban, Petrus Bala Pattyon, juga membenarkan foto tersebut.

“Pelaku sudah ditahan,” kata Petrus.

Soal motif, dugaan sementara penembakan tersebut dipicu oleh ketidakterimaan pelaku karena sering dimarahi korban.

“Informasinya sering di-bully dan dipersalahkan,” ucap Petrus.

Dalam hierarki Polri, pangkat Bharada satu tingkat di bawah pangkat Bharatu.

Terjadi Jumat Dini Hari

Kasus penembakan tersebut terjadi pada Jumat (16/10) dini hari di ruang pemadam kebakaran Ditpoludara, Pondok Cabe. Saat kejadian, Valdo disebut sedang beristirahat.

Berdasarkan laporan awal, Andika diduga membawa senjata tajam jenis golok dari rumahnya sejak Senin (12/10) karena merasa takut secara berlebihan.

Pada Jumat dini hari, setibanya di markas, dia mengambil senjata api dari pos penjagaan, lalu mendatangi tempat korban beristirahat.

Andika disebut menembakkan senjata api beberapa kali ke arah tubuh korban.

Setelah Valdo terjatuh, ia kembali menembak ke arah kepala korban dan menyerang lehernya menggunakan senjata tajam.

Usai kejadian, Andika menyerahkan diri kepada Unit Provos Ditpoludara. Ia kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Hari Purwanto SDR, Prabowo-Gibran Belum Mampu Jawab Kebutuhan Rakyat : Sembako Murah dan Lapangan Kerja

Oleh Redaksi · 19 Okt, 09.03 WIB



BANDA ACEH - Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto memberikan penilaian terkait menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, ada catatan penting yang perlu ia sampaikan sebagai bagian dari evaluasi kepemimpinan nasional tersebut. Di mana menurut Hari, Prabowo-Gibran masih belum mampu menjawab kebutuhan utama masyarakat, terutama harga sembako murah dan penyediaan lapangan pekerjaan.

“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum bisa menjawab yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama sembako murah dan lapangan pekerjaan,”

kata Hari dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Senin (19/10/2026).

Ditambah lagi, fluktuasi tensi Politik yang dinilai belum begitu terkendali. Terlebih persoalan pelik seperti kasus korupsi dan pelanggaran hukum masih cukup marak.

“Dinamika politik, korupsi dan hukum masih mendominasi dalam pemerintahan saat ini,” sambungnya.

Hari juga menyoroti ucapan Prabowo pada awal pemerintahan yang menyebut, “Ikan Busuk dari Kepala”. Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi relevan untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan yang kini mendekati dua tahun.

Ia turut mempertanyakan komitmen pemerintah dalam melawan oligarki. Menurut Hari, perlawanan terhadap kelompok oligarki belum terlihat secara nyata karena masih terdapat apa yang disebutnya sebagai “oli kotor” di lingkaran pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Perlawanan terhadap ‘Oligarkhi’ belum menjadi bukti nyata karena di lingkaran pemerintahan masih ada ‘oli kotor’ yang menempel di Prabowo-Gibran,” kata Hari.

Hari menilai, kondisi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan agenda ekonomi yang berpihak kepada rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Ia menyoroti belum terlihatnya tindakan konkret pemerintah

dalam menerapkan pasal tersebut secara murni dan konsekuen. Menurutnya, persoalan oligarki dan kepentingan di lingkaran kekuasaan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan agenda ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.

“Sehingga tindakan konkret dari Pasal 33 yang menjadi agenda utama belum terlihat karena ‘Oligarkhi Vs Oli Kotor’ masih membungkus perseteruan dalam pemerintahan,” tutur Hari.

Hari meminta pemerintahan Prabowo-Gibran memanfaatkan sisa masa jabatan hingga 2029 untuk lebih fokus menjawab kebutuhan masyarakat.

“Di sisa pemerintahan sampai dengan 2029 fokuslah menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Hari

NASIONAL

Hanya Jokowi yang Tahu Sosok Penunggang Gelap Polemik Ijazah

Oleh Redaksi · 19 Okt, 10.44 WIB



BANDA ACEH -Pengamat Politik Adi Prayitno menilai wajar polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya sekaligus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perhatian publik.

Hal itu menyusul pernyataan Jokowi yang menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran sebagai operasi Politik yang ditunggangi pihak tertentu.

Menurut Adi, tudingan adanya aktor di balik polemik ijazah bukan kali pertama disampaikan Jokowi. Karena itu, publik wajar mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud sebagai penunggang gelap tersebut.

“Kalau ini disebut operasi politik, mungkin ada musuh politik Jokowi yang hingga saat ini menilai kebijakan maupun manuver politiknya telah melukai perasaan politik kelompok tertentu,” kata Adi, Senin, 19 Oktober 2026.

Ia menduga, pihak yang dimaksud Jokowi bisa saja berasal dari

kalangan yang selama ini tidak senang atau merasa tidak nyaman dengan kiprah Jokowi selama menjabat sebagai pejabat publik.

Meski demikian, Adi menegaskan bahwa hanya Jokowi yang dapat memastikan siapa sosok di balik tudingan operasi politik tersebut.

“Tentu hanya Jokowi dan Tuhan saja yang tahu siapa yang disebut sebagai penunggang gelap sekaligus melakukan operasi politik itu,” ujarnya.

Adi menambahkan, publik hanya bisa berspekulasi mengenai pihak yang berada di balik polemik ijazah Gibran. Jika merujuk pada dugaan konflik politik selama ini, spekulasi tersebut kemungkinan mengarah kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politik Jokowi.

Menurutnya, lawan politik dapat melakukan berbagai manuver sepanjang isu tersebut dinilai bisa menjadi instrumen untuk melancarkan serangan politik.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Oleh Redaksi · 19 Okt, 08.40 WIB



BANDA ACEH -Polemik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dilepaskan dari persoalan konstitusi, kepentingan Politik, dan masa depan stabilitas nasional.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat terdapat operasi politik yang bertujuan mempertahankan posisi Gibran di tengah desakan masyarakat agar persoalan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditindaklanjuti oleh lembaga negara.

Menurut Amir, persoalan mendasar dalam polemik tersebut adalah apakah kekuasaan akan digunakan untuk menjalankan konstitusi atau justru dipertahankan demi kepentingan politik tertentu.

“Kasus Gibran berbicara tentang kekuasaan dan konstitusi. Padahal, kekuasaan itu untuk melaksanakan konstitusi. Kalau sudah ada keputusan MK, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Amir, dikutip Senin 19 Oktober 2026.

Menurut Amir, dalam negara hukum, tidak boleh ada pejabat yang menempatkan kepentingan mempertahankan jabatan di atas kepentingan konstitusi.

Amir juga mempertanyakan kepentingan politik di balik kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menemui Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara menjelang perkembangan putusan MK yang berkaitan dengan persoalan ijazah Gibran.

“Jokowi justru yang mendalangi operasi politik. Apa kepentingan Jokowi mendatangi Prabowo di Kertanegara menjelang keputusan MK soal ijazah Gibran? Ini yang perlu dipertanyakan,” kata Amir.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Banyak Sarjana Menganggur Sementara Ada yang Tanpa Ijazah SMA Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 19 Okt, 13.27 WIB



BANDA ACEH -Pengamat Politik Ubedilah Badrun menyoroti anomali banyak generasi muda berijazah sarjana kesulitan mendapatkan pekerjaan, sementara ada pihak yang ijazah SMA-nya dipersoalkan tetapi menjabat sebagai wakil presiden.

Ubedilah menilai polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar menyangkut dokumen pendidikan, melainkan juga menyentuh aspek etika dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Bayangkan situasi Generasi Z yang 60 persen menganggur dan

mereka punya ijazah. Mereka terkatung-katung mencari pekerjaan, sementara wakil presidennya ijazah tingkat SLTA-nya bermasalah,” kata Ubedilah, di kanal Youtube Forum Keadilan, Senin, 19 Oktober 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai standar etik yang melekat pada pemimpin negara. Terlebih, bangsa Indonesia lahir dari perjuangan para pendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai etik.

Ia menyebut polemik syarat pendidikan Gibran sebagai skandal Politik yang dapat meruntuh-

kan kepercayaan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Bagaimana negara berjalan dengan pemimpinnya yang runtuh secara etik? Legitimasi moralnya kan hancur,” ujarnya.

Ubedilah menambahkan, polemik tersebut telah menjadi perbincangan masyarakat luas. Ia menilai persoalan ini berpotensi memperdalam kekecewaan publik terhadap institusi negara ketika masyarakat masih berjuang mendapatkan pekerjaan meski telah menempuh pendidikan tinggi

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Saatnya DPR Tegas terhadap Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 19 Okt, 08.43 WIB



BANDA ACEH -Tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan persoalan yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Diketahui, MK tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah keju-

ruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. "Ini saatnya fraksi-fraksi partai Politik di DPR bersikap tegas atas polemik ijazah Gibran," kata pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Senin 19 Oktober 2026. Menurut Amir, agenda politik di parlemen tidak seharusnya mengabaikan persoalan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap konstitusi. "Yang berperan dalam kasus Gibran itu fraksi-fraksi, karena fraksi merupakan kepanjangan

tangan partai politik. Ketika sidang DPR berlangsung, fraksi harus berbicara mengenai persoalan ini," kata Gibran. Amir mengakui, masa reses DPR dapat memengaruhi waktu pembahasan. Namun, ia berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Amir juga mengingatkan partai-partai politik yang terlibat dalam proses pencalonan Gibran agar tidak menghindari tanggung jawab politik. Amir menekankan, proses pencalonan dan persoalan konstitusional yang diperdebatkan masyarakat perlu dijelaskan secara terbuka.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Oleh Redaksi · 19 Okt, 08.38 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi agaknya benar-benar sudah ditinggalkan. Tidak hanya oleh partai Politik (parpol), tapi juga birokrasi, Polri, TNI, dan terakhir oligarki. "Oligarki agaknya lawan Presiden Prabowo Subianto yang paling hakiki saat ini. Tentu saja bukan semua oligarki, tapi oligarki hitam yang selama ini sudah mengangangi banyak hal di negeri ini," kata Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, dikutip Senin 19 Oktober 2026. Jokowi sendiri, menurut Erizal, mungkin tidak menyangka Presiden Prabowo "berani" melawan

oligarki seperti saat ini. Dan lebih tak menyangka lagi bisa bertahan sejauh ini. "Dua tahun berlalu yang terlihat penguatan, tidak pelemahan. Kapolri diganti, langsung mutasi besar-besaran dalam waktu singkat, dan Polri, tidak sama lagi dulu dan kini," kata Erizal. Presiden Prabowo memang hanya mengganti posisi antara KSAD dan Wakil Panglima TNI. Tapi itu sudah dianggap cukup mengubah situasi. "Yang agak berbau Jokowi mulai diparkir di tempat tersendiri," kata Erizal.

Birokrasi jangan ditanya lagi. Sudah lebih dulu pergi meninggalkan Jokowi. Tapi situasi terus bergerak dan belum berhenti. Bareskrim Polri juga mulai menyelidiki aduan masyarakat (Dumas) terkait tindak pemalsuan pembuatan dan penggunaan Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka. "Tapi banyak yang masih ragu itu akan bisa berlanjut. Partai-partai juga diragukan mau follow up putusan Mahkamah Konstitusi," pungkas Erizal.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ADVERTORIAL

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

ACEH

Ajak Pelajar Jauhi Narkoba dan Stop Perundungan, Kapolda Aceh: Masa Depan Dimulai dari Karakter

Oleh Redaksi · 19 Okt, 16.44 WIB



BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan bahwa masa depan generasi muda tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga karakter, pergaulan, dan kepedulian terhadap sesama.

Pesan itu disampaikan saat menjadi Inspektur Upacara Bendera di SMA Negeri 2 Senin, 19 Oktober 2026.

Di hadapan kepala sekolah, dewan guru, tenaga pendidik, dan siswa, Kapolda mengajak seluruh warga sekolah melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba dan perundungan (bullying).

Ia menegaskan, sekolah harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar, mengembangkan potensi, menjalin persahabatan, dan meraih cita-cita.

Ruddi juga menyoroti bahaya narkoba yang dapat merusak kesehatan, menghambat pendidikan, dan mengancam masa depan generasi muda.

Berdasarkan data Ditresnarkoba Polda Aceh, sepanjang Januari

hingga September 2026, Polda Aceh dan jajaran mengungkap 979 kasus narkoba dengan 1.253 tersangka, termasuk 35 orang dari kalangan pelajar atau remaja.

“Adik-adik sekalian, masa sekolah sangat berharga untuk belajar, mengembangkan diri, dan meraih cita-cita. Karena itu, jagalah pergaulan, beranilah menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba, dan isi waktu dengan kegiatan positif,” pesan Kapolda.

Selain narkoba, Kapolda mengingatkan pentingnya mencegah perundungan di lingkungan pendidikan.

Data Polresta Banda Aceh yang disampaikan dalam amanat tersebut mencatat empat kasus perundungan dengan empat korban dan 14 pelaku.

Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap siswa berhak merasa aman, dihargai, dan diterima di lingkungan sekolah.

“Jadilah teman yang saling menghargai, bukan menyakiti. Hindari ejekan, hargai perbedaan, dan jangan menganggap perundu-

ngan sebagai candaan. Jika mengalami atau menyaksikan perundungan, jangan ragu meminta bantuan kepada guru atau orang tua,” tegasnya.

Ia juga mengajak para guru membangun komunikasi terbuka dengan siswa, peka terhadap perubahan perilaku, serta menangani setiap laporan perundungan secara bijaksana.

Menurutnya, kepedulian dan keteladanan pendidik berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan membentuk karakter generasi muda.

Ruddi berpesan agar siswa berani bercita-cita besar dan berusaha mewujudkannya melalui kedisiplinan, kesungguhan belajar, dan perilaku baik.

Ia menekankan bahwa prestasi akademik harus diimbangi dengan akhlak, kejujuran, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama.

“Kepada adik-adik sekalian, manfaatkan masa sekolah sebaik-baiknya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, hormati guru,

sayangi orang tua, dan pilih lingkungan pertemanan yang membawa kebaikan. Saya percaya, dari SMA Negeri 2 Banda Aceh akan lahir generasi hebat yang membanggakan orang tua, mengharumkan nama Aceh, dan berkontribusi bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.

Abituren Akabri 1996 itu menegaskan bahwa perlindungan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” menjadi landasan untuk memperkuat kepedulian, mencegah perilaku menyimpang, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta kondusif.

Ruddi berharap para pelajar tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas, menghargai perbedaan, dan bermanfaat bagi sesama.

Sebab, masa depan Aceh yang lebih baik dibangun oleh generasi muda yang terlindungi, berkarakter, dan berani memilih jalan yang benar.[]

ACEH

Kabid GTK H. Faisal Kobarkan Semangat Belajar Siswa SD Gaseu

Oleh Aceh Barat · 19 Okt, 16.25 WIB



Kabid GTK H. Faisal, S.Pd., berfoto bersama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sungai Mas, FOTO/ist

MEULABOH – Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK), H. Faisal, S.Pd., menjadi pembina upacara di SD Gaseu, Kecamatan Sungai Mas, Senin (19/10/26).

Dalam amanatnya, ia memotivasi para siswa agar terus bersemangat belajar, disiplin, dan tekun dalam menggapai cita-cita.

H. Faisal juga menegaskan bahwa anak-anak di Sungai Mas merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, sebagaimana anak-anak yang tinggal di perkotaan.

“Anak-anak Sungai Mas juga anak Indonesia. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas seperti anak-anak di kota. Karena itu, kita harus terus mendorong semangat belajar mereka serta berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang baik bagi seluruh anak,” ujarnya.

Menurutnya, semangat belajar siswa perlu didukung dengan per-

hatian, kerja sama, dan komitmen semua pihak agar anak-anak di wilayah Sungai Mas memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Usai pelaksanaan upacara, H. Faisal melanjutkan kegiatan dengan menggelar pertemuan bersama seluruh kepala sekolah se-Kecamatan Sungai Mas sekaligus bersilaturahmi dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) setempat.

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat koordinasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Sungai Mas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara jajaran GTK, kepala sekolah, dan K3S semakin kuat sehingga pemerataan akses serta peningkatan kualitas pendidikan dapat terus diwujudkan, termasuk bagi anak-anak di wilayah yang jauh dari perkotaan, tutupnya.[]

Editor: Biro Meulaboh.

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Dekatkan Layanan kepada Nelayan, KSOP Malahayati Hadirkan Gerai E-Pas Kecil dan Edukasi Keselamatan Pelayaran di Pidie Jaya

Oleh Redaksi · 19 Okt, 09.33 WIB



BANDA ACEH, PIDIE JAYA – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Malahayati terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan legalitas administrasi kapal dan keselamatan pelayaran bagi masyarakat nelayan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Gerai Elektronik Pas Kecil (E-Pas Kecil) yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran serta Sosialisasi Alur Penerbitan Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aula Gedung Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan ini merupakan langkah nyata KSOP Malahayati dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir, khususnya pemilik kapal nelayan. Selain mempermudah pengurusan dokumen kapal, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan mengenai pentingnya legalitas kapal, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penerapan standar keselamatan dalam setiap aktivitas pelayaran.

Kepala KSOP Kelas IV Malahayati, Capt. Amfami, S.H., M.M., M.Mar., menegaskan bahwa legalitas dokumen kapal harus berjalan beriringan dengan kesadaran dan penerapan keselamatan pelayaran. Menurutnya, tertib administrasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kegiatan melaut yang aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa proses pengurusan dokumen dan perizinan kapal saat ini telah terintegrasi secara elektronik melalui sistem E-Pas Kecil. Digitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan dalam menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih mudah, efektif, dan transparan bagi masyarakat nelayan.

Meski demikian, Capt. Amfami menyadari bahwa penerapan layanan berbasis digital masih menjadi tantangan bagi sebagian nelayan, terutama mereka yang mengalami kendala akses internet maupun belum terbiasa mengoperasikan sistem elektronik. Oleh karena itu, KSOP Malahayati berkomitmen

untuk terus memberikan pendampingan agar seluruh nelayan dapat mengakses layanan tersebut dengan baik.

“Kami akan terus membantu dan mendampingi nelayan yang mengalami kendala dalam pengurusan dokumen kapal melalui sistem elektronik. Meskipun pelayanan telah berbasis online, kami tetap hadir melalui pelayanan langsung atau jemput bola agar masyarakat mendapatkan bantuan yang diperlukan,” demikian pene-gasan Kepala KSOP Malahayati.

Melalui pendekatan tersebut, KSOP Malahayati berharap digitalisasi pelayanan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat pesisir. Sebaliknya, sistem E-Pas Kecil diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen kapal, sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi dan menjangkau lebih banyak nelayan.

Selain pelayanan administrasi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi keselamatan pelayaran dan sosialisasi alur penerbitan rekomendasi BBM bagi nelayan. Rangkaian kegiatan turut mencakup

penyerahan E-Pas Kecil secara simbolis serta pembagian life jacket kepada pemilik kapal nelayan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesadaran dan penerapan keselamatan saat melaut.

Materi mengenai E-Pas Kecil dan keselamatan pelayaran disampaikan oleh Hasbi dan Ahmad Afandi Pulungan, S.S.T.Pel., M.AP. Sementara itu, materi terkait sektor perikanan daerah disampaikan oleh Robby Khairul Umam, S.Tr.Pi., selaku Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam sosialisasi tersebut, para nelayan diingatkan untuk memastikan kondisi kapal laik berlayar, melengkapi perlengkapan keselamatan, memperhatikan informasi cuaca, serta tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi tidak memungkinkan. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya pencegahan kecelakaan dan perlindungan jiwa di laut.

ACEH

MTQ ke-38 Aceh Barat Lancar, Juara Segera Ditetapkan

Oleh Aceh Barat · 19 Okt, 16.47 WIB



Peserta MTQ ke-38 tingkat Kabupaten Aceh Barat sedang melantunkan ayat suci Al-Qur'an di atas minbar perlombaan, FOTO/ist

MEULABOH – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-38 tingkat Kabupaten Aceh Barat memasuki hari ketiga dengan lancar.

Seluruh cabang perlombaan ditargetkan rampung pada Senin (19/10/26), sebelum acara penutupan digelar pada malam hari di Masjid Agung Baitul Makmur, Meulaboh.

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Aceh Barat, Husensyah, mengatakan hingga Minggu (18/10/2026) malam, pelaksanaan MTQ tidak menghadapi kendala berarti. Meski demikian, sejumlah cabang perlombaan masih harus menyelesaikan tahapan menuju babak final.

“Alhamdulillah, sampai sore tadi tidak ada kendala. Namun, ada beberapa cabang yang masih belum menyelesaikan rangkaian menuju final, seperti Qira'ah Sab'ah di Suak Ribee dan Tahfiz Al-Qur'an di Masjid Ujong Baroh,” kata Husensyah, Minggu malam.

Ia menjelaskan, pada Senin pagi, cabang Syarhil Quran dijadwalkan menggelar babak final di Masjid Nurul Huda. Seluruh cabang perlombaan diharapkan sudah menyelesaikan babak final pada siang hari agar persiapan penutupan dapat berjalan sesuai jadwal.

“Kami sudah menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa pelaksanaan MTQ ini sesuai dengan jadwal, yakni 16 hingga 19 Oktober. Saat ini, kami sedang mempersiapkan acara penutupan sehingga seluruh rangkaian kegiatan harus selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Setelah seluruh perlombaan rampung, dewan hakim akan menggelar rapat pleno untuk merekapitulasi dan menetapkan hasil penilaian. Proses tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin siang hingga menjelang waktu Asar.

Husensyah berharap hasil penilaian dapat diserahkan kepada panitia pada Senin sore sehingga para juara dari masing-masing cabang dapat diumumkan dalam acara penutupan.

“Pada sore harinya, nilai dari dewan hakim sudah diserahkan kepada kami untuk selanjutnya diumumkan pada malam penutupan di Masjid Agung Baitul Makmur,” katanya.

Acara penutupan MTQ ke-38 tingkat Kabupaten Aceh Barat dijadwalkan berlangsung pada Senin malam, sekaligus menjadi momentum pengumuman para peserta terbaik dari berbagai cabang yang diperlombakan.[]

Editor: Biro Meulaboh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

3 BERITA

OPINI

Refleksi Dua Tahun Rezim Prabowo; 21 Inpres dan Problem Akuntabilitas Kebijakan Publik

Oleh Redaksi · 19 Okt, 17.21 WIB



Ilustrasi tumpukan dokumen "INPRES" dan cap resmi yang melambangkan kecepatan dan volume keputusan eksekutif yang tinggi (21 Inpres dalam dua tahun). FOTO/AI for HAL.

Oleh: Radit Fabian, S.H((KADIV Analisis Hukum & Kebijakan Publik))

UA tahun setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo-Gibran paling sering dinilai dari kecepatannya. Ukuran itu kurang tepat.

Pemerintahan yang sewenang-wenang pun bisa sangat cepat. Pertanyaan yang lebih tajam dalam negara hukum demokratis adalah lewat pintu mana keputusan negara dibuat, dan siapa yang berdiri di pintu itu untuk mengujinya.

Untuk banyak keputusan besar, pintu itu adalah Instruksi Presiden. Pada Januari 2025 sampai April 2026 terbit setidaknya 21 Inpres.

Masa kedua pemerintahan Joko Widodo hanya mencatat empat Inpres pada 2023 dan dua pada 2024 sebelum pelantikan.

Kami menduga Inpres menjadi pintu favorit karena ia nyaris tidak punya penjaga.

Untuk memahami mengapa Inpres begitu menggoda, kita perlu kembali ke posisi hukumnya.

Inpres adalah beleidsregel, peraturan kebijakan, bukan rechtsregel, norma hukum yang mengikat. Dari situ lahir empat konsekuensi yang semuanya merupakan batas.

Pertama, Inpres tidak masuk hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011. Ia bukan norma yang dibentuk lewat jalur legislasi, dan karena itu tidak semestinya dipakai untuk menciptakan norma.

Kedua, Inpres tidak mengikat warga negara. Ia ditujukan kepada pejabat di lingkungan eksekutif, bukan kepada publik.

Ketiga, Inpres tidak boleh mengikat substansi yang sudah diatur undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi.

Keempat, Inpres tidak dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi. Batas keempat itu patut dicermati. Ia berarti Inpres tidak dipagari dari luar, sehingga kepatuhan pada tiga batas pertama bergantung pada kesadaran diri eksekutif.

Di sinilah letak paradoksnya. Meski secara formal lemah, Inpres

yang diterbitkan Presiden dan ditujukan kepada pejabat yang berada dalam orbit kekuasaan eksekutif memiliki daya paksa administratif yang besar, terlepas dari status hukumnya.

Instrumen yang secara hukum bukan norma dapat bekerja seperti norma, tanpa menanggung beban pembentukan norma. Ukuran nilainya karenanya bukan apakah Presiden berwenang menerbitkan Inpres.

Yang perlu ditanya adalah apakah Inpres itu masih menjalankan keputusan yang sudah sah, atau sudah mengambil alih fungsi formulasi, legislasi, dan penganggaran. Inpres yang sehat membantu birokrasi melaksanakan keputusan yang lahir dari proses semestinya.

Inpres yang bermasalah menjadikan instruksi itu sendiri sebagai keputusan, sementara perencanaan, konsultasi, dan pengawasan menyusul belakangan, atau tak pernah datang.

Pertama, batas yang dilampaui: Koperasi Merah Putih

Contoh paling terang adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program unggulan dengan target 80.000 unit. Inpres 9/2025 menetapkan target pembentukan dan mengikat 16 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk komitmen anggaran.

Inpres 17/2025, tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi, lalu mengambil empat keputusan sekaligus.

Presiden menetapkan plafon Rp3 miliar per unit dengan tenor enam tahun. Ia merancang pendanaan campuran dari APBN, APBD, Dana Desa, dan kredit bank Himbara serta Bank Syariah Indonesia.

Ia menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana utama tanpa tender. Dan ia mengikat bank negara serta pemerintah daerah pada skema itu.

TOKOH

Profil Kamaruddin Simanjuntak, Pengacara Brigadir Yosua yang Tutup Usia

Oleh Redaksi · 19 Okt, 13.51 WIB



Advokat Kamaruddin Hendra Simanjuntak atau akrab dikenal dengan Kamaruddin Simanjuntak meninggal dunia pada Senin (19/10/2026) pukul 02.47 WIB di Rumah Sakit Pelni

BANDA ACEH - Advokat Kamaruddin Hendra Simanjuntak atau akrab dikenal dengan Kamaruddin Simanjuntak meninggal dunia pada Senin (19/10/2026) pukul 02.47 WIB di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta.

Namanya dikenal luas setelah menjadi kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dalam kasus pembunuhan yang menyeret Ferdy Sambo.

Informasi duka tersebut disampaikan melalui unggahan Instagram Story akun @martin.lukas.simanjuntak.

Dalam unggahan itu, disebutkan jenazah Kamaruddin disemayamkan di Rumah Duka UKRIDA.

Sepanjang kariernya, Kamaruddin menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik, mulai dari kasus korupsi e-KTP, Wisma Atlet, dan Hambalang hingga perkara penistaan agama yang menjerat Muhammad Kece.

Perjalanan Hidup Kamaruddin Simanjuntak

Kamaruddin lahir di Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, pada 21 Mei 1974.

Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Siborongborong pada 1992, ia merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan memperbaiki kehidupannya.

Perjalanan hidupnya di ibu kota tidak mudah. Ia pernah tinggal di kolong jembatan di kawasan Klen der, Jakarta Timur, selama sekitar tiga bulan karena tidak memiliki uang untuk menyewa tempat tinggal. Untuk bertahan hidup, ia menjalani berbagai pekerjaan serabutan.

Pada 1993, Kamaruddin mendapat pekerjaan sebagai customer service di sebuah restoran. Ia kemudian mencoba berbisnis, tetapi usahanya tidak bertahan lama.

Setelah itu, ia sempat bekerja sebagai tenaga penjual atau sales sebelum akhirnya memutuskan menekuni bidang hukum.

Kamaruddin melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, pada 2000. Ia menuntas-

kan studinya pada 2004 dengan predikat cum laude.

Kariernya sebagai advokat terus berkembang. Pada 2007, ia bergabung dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Ia kemudian mendirikan Victoria Law Firm pada 2019 dan dikenal melalui firma hukum Kamaruddin Simanjuntak & Partners.

Di luar profesi hukum, Kamaruddin juga terjun ke Politik. Pada 7 Juli 2020, ia mendirikan Partai Demokrasi Republik Indonesia Sejahtera.

Vokal Tangani Perkara Besar

Nama Kamaruddin semakin dikenal publik karena gaya komunikasinya yang tegas dan terbuka.

Ia kerap menyampaikan pandangan secara langsung kepada media mengenai perkara yang ditanganinya, termasuk persoalan yang dinilainya perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Salah satu prinsip yang disebut menjadi pegangannya ialah Honeste Vivere, Fiat Justitia Ruat Coelum, yang secara umum bermakna hidup dengan jujur dan menegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh.

Sebelum menangani kasus Brigadir J, Kamaruddin pernah terlibat dalam sejumlah perkara korupsi besar, termasuk kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Wisma Atlet, dan Hambalang.

Ia juga pernah menjadi kuasa hukum Muhammad Kece dalam perkara penistaan agama pada 2021.

Namun, perkara yang paling melekat dengan namanya adalah pembunuhan Brigadir J pada 2022.

Kamaruddin menjadi kuasa hukum keluarga Yosua dan secara terbuka mendorong pengungkapan berbagai kejangalan yang dipersoalkan pihak keluarga.

Kasus tersebut menyita perhatian nasional setelah menyeret mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo serta sejumlah anggota kepolisian lainnya.

Dalam mengawal perkara itu, Kamaruddin beberapa kali melontarkan pernyataan yang menuai sorotan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



KOMUNITAS

Asap Karhutla Selimuti Medan, Sejumlah Organisasi Bagikan 500 Masker

Oleh Explore Vipho GRAS · 19 Okt, 07:50 WIB



MEDAN - Ancaman asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, mendorong berbagai elemen masyarakat untuk mengambil tindakan nyata.

Di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla di Sumatera Utara, kepedulian terhadap warga yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditunjukkan empat organisasi melalui aksi pembagian 500 masker di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (18/10/2026).

Aksi sosial tersebut digelar oleh Perhimpunan Penjelajah Alam Bencana dan Konservasi Generasi Rimba Alam Semesta (GRAS) yang merupakan kelompok pencinta alam (KPA) binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatera Utara, Generasi Pelestari Hutan (Genries) Sumatera Utara, Rimbapala Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), dan Relawan Indonesia (Relindo) Sumatera Utara.

Pembagian masker dilakukan kepada masyarakat dan pengguna jalan di persimpangan lampu lalu lintas kawasan Fly Over Jamin Ginting, Medan. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap warga yang beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.

Aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat yang beraktivitas di tengah paparan asap karhutla. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajakan untuk meningkatkan kesadaran bersama mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi lingkungan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, pada 16 Oktober 2026 terdeteksi sebanyak 9.324 titik panas (hotspot) yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia.

Data tersebut menggambarkan luasnya wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam pemantauan dan upaya pencegahan kebakaran

hutan dan lahan. Titik panas menjadi indikasi awal yang perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan karena tidak seluruh titik panas secara otomatis menunjukkan terjadinya kebakaran.

Pemantauan secara berkelanjutan, deteksi dini, dan penanganan cepat sangat penting untuk mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana ekologis yang tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat. Asap yang ditimbulkan mengandung partikel halus dan polutan yang dapat mengganggu sistem pernapasan, terutama pada anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit pernapasan atau gangguan kesehatan tertentu.

Asap Karhutla Terdeteksi di Seluruh Wilayah Sumatera Utara

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa berdasarkan pemantauan citra sebaran asap kebakaran hutan dan lahan pada Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 08.00 WIB, asap terdeteksi di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan Air Quality Monitoring System (AQMS) dan stasiun pemantau lingkungan pada 14 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, kualitas udara di Kota Medan menunjukkan kondisi yang bervariasi, mulai dari kategori sedang hingga tidak sehat.

Kawasan Jalan Pinang Baris, Medan Sunggal, tercatat berada dalam kategori tidak sehat dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebesar 136. Adapun kawasan Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan Johor, berada dalam kategori sedang dengan ISPU sebesar 83.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT	PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI	Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA	Adam
REDAKTUR	Hayat
SEKRETARIS REDAKSI	Ola
Jurnalis	
Banda Aceh:	
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR	12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani	
Bireuen:	
1. M. Ilham Sakubat	
Lhokseumawe:	
1. Yoppi	
Aceh Barat:	
1. Kurniawan	
Jawa Timur:	
1. Rut Sriwahyuni	
Fotografer:	
1. Mishabul Amin	
2. Nazaruddin	
Social Media Manager:	
1. Syukur M. Amin	